

LAPORAN TAHUNAN **INFID**



LAPORAN
TAHUNAN
INFID
2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
PERJALANAN INFID SEPANJANG 2022	viii
INFID DALAM ANGKA	x
KEGIATAN BESAR INFID	xi
TESTIMONI JARINGAN INFID	xii
DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	xvi
BAB I PROFIL 37 TAHUN PERJUANGAN INFID	1
BAB II PROGRAM INFID 2022	7
Program HAM dan Demokrasi	7
Program Penurunan Ketimpangan	17
Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	19
BAB III INFID DALAM MEDIA	28
BAB IV INFID DI TENGAH MASYARAKAT	30
DAFTAR KEGIATAN TAHUN 2022	32

KATA PENGANTAR

Laporan. Sepatah kata sederhana yang banyak diwajibkan dan dapat berdampak banyak tetapi juga terkadang diabaikan. Pada sejatinya, laporan menjadi salah satu ruang utama bagi setiap kita, perorangan dan lembaga, untuk menunjukkan wajah sejati kita dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, atau dapat juga dipoles-poles seadanya atau bahkan menor berlebihan. Laporan dengan sebaik-baiknya itu haruslah dimaknai, dengan sepenuh kejujuran, yang berarti dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Karena terkadang, kita begitu bergairah untuk menunjukkan kegemilangan, dan pada sisi lain agak terengah-engah untuk memamerkan hal-hal lain yang membutuhkan peningkatan.

Bagi INFID, dan mungkin bagi begitu banyak organisasi masyarakat sipil lainnya, laporan tahunan yang dipublikasikan adalah melampaui sebuah kewajiban semata, karena sejatinya dilakukan dengan penuh kesadaran dan semangat, juga didasari oleh pemahaman akan hadirnya manfaat dari adanya sebuah laporan tahunan yang dapat menjadi pelajaran bersama, bagi lembaga dan sidang pembaca yang mulia. Sebagaimana lazimnya, sebuah laporan tahunan mencatat secara cermat dan akurat segala hal yang dilakukan oleh lembaga pada periode waktu tertentu. Tidak kurang pula perihal capaian, tantangan, dan kendala yang dihadapi.

Laporan yang sedang bapak-ibu dan rekan-rekan baca ini, adalah laporan tahunan INFID yang disusun dalam beberapa bab untuk kemudahan penjejakan. Bab pertama membahas tentang sebuah refleksi dari 37 tahun perjalanan INFID yang tentu saja, penuh rona, dinamika, dan rangkaian peristiwa yang mungkin sulit saat dihadapi, penuh susah payah dan berdarah-darah, tetapi menjadi lebih banyak menjadi sisi yang indah dikenang pada masa sekarang. Hal yang sepertinya mudah dipahami saat ini, tetapi belum tentu mudah dijalani pada waktunya. Kemudian dilanjutkan dengan bab II yang menggambarkan tentang kinerja, capaian, dan tantangan dari implementasi program HAM dan Demokrasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Penurunan Ketimpangan secara mendalam. Menyadari pentingnya daya jangkau dan outreach sebagai bagian dari upaya menjangkau lebih luas, menyentuh lebih banyak, dan berbagi lebih dalam, bab selanjutnya membahas persentuhan INFID dan Media, yang dilandasi dengan pemahaman dan kesadaran penting berbagi pengetahuan dari kerja-kerja INFID, melalui penelitian dan advokasi kebijakan yang sudah dilakukan, dan juga

menggunakan media sebagai bagian dari kerja advokasi dan kampanye untuk pemajuan hal-hal yang dipandang sangat penting, melalui media cetak, elektronil, dan media sosial.

Pada akhirnya, sebuah laporan dapat menjadi sekumpulan data yang sangat bermakna atau terkadang menjadi teronggok begitu saja di pojok sejarah. Tetapi, senyatalah, laporan ini disusun dengan semangat memberikan pertanggungjawaban dan keadilan kepada sesama. Kepada sidang pembaca yang mulia, para anggota INFID yang terhormat, mitra pembangunan yang sejahtera dan pemerhati kelembagaan yang penuh ketelitian. Perkara memberikan keadilan ini adalah perkara yang berkesan lebih enteng di lisan dibanding dalam tindakan. Sehingga, menjadi pentinglah, sebuah pengingat yang ditaklimatkan dalam tetralogi Bumi Manusia: Bersikaplah adil sejak dari pikiran!

Selamat membaca, mengunyah, dan menikmati laporan yang disusun sepuh pertimbangan, rasa pertanggungjawaban, dan hasrat memenuhi keadilan.

Jabat erat dari Jati Padang

Iwan Misthohizzaman
Direktur Eksekutif

DAFTAR SINGKATAN

A4SD	: Action for Sustainable Development
AD/ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
ADN	: Asia Democracy Network
AGPAII	: Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badilag	: Badan Peradilan Agama
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Bakumsu	: Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLU	: Badan Layanan Umum
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPET	: Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme
BPS	: Badan Pusat Statistik
C20	: Civil 20
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DBK	: Dana Bantuan Korban
Densus	: Detasemen Khusus
Dit. Kumlasi	: Direktorat Hukum dan Regulasi
EIU	: Economist Intelligence Unit
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FKS	: Forum Kota Sehat
G20	: Government 20
GCAP	: Global Call to Action Against Poverty
GEDSI	: <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
HAKTP	: Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
Idensos	: Identifikasi Sosial
IDPM	: INFID Development Partner Meeting
IHS	: Indonesia Health Services
IKa	: Indonesia untuk Kemanusiaan
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
JANIC	: Japan NGO Center for International Cooperation
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KBB	: Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KOICA	: Korea International Cooperation Agency
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KPAPO	: Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
KSP	: Kantor Staf Presiden
KTU	: Konferensi Tingkat Tinggi
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MSF	: <i>Multistakeholder Forum</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NED	: National Endowment for Democracy
OAP	: Orang Asli Papua
OGI	: Open Government Indonesia
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
Otsus	: Otonomi Khusus
PBHI	: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PCI	: Pimpinan Cabang Istimewa
PCINU	: Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
Perban	: Peraturan Badan
Perpres	: Peraturan Presiden
PP	: Pengurus Pusat
PP	: Peraturan Pemerintah
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RAD PE	: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RATs	: <i>Risk Assessment Tools</i>
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Renstra	: Rencana Strategis
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas FTF	: Satuan Tugas Foreign Terrorist Fighters
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDO	: Sekolah Demokrasi Online
SIDS	: Small Island Developing State
SMA/SMK	: Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan
SUA	: Sidang Umum Anggota
TII	: Transparansi Internasional Indonesia
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNDP	: United Nations Development Programme
UNGPs on BHR	: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
USAID	: United States Agency for International Development
UU KIP	: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
UU TPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
WIR	: World Inequality Report
WRI-LCDI	: World Resource Institute - Low Carbon Development Indonesia
WVI	: Wahana Visi Indonesia
YKP	: Yayasan Kesehatan Perempuan

PERJALANAN INFID SEPANJANG 2022

Laporan Tahunan 2022 ini merupakan refleksi komitmen kami dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, memperkuat demokrasi, dan mempromosikan hak asasi manusia (HAM) sebagai langkah kunci dalam mengurangi ketimpangan. Dalam laporan ini, kami berbagi berbagai pencapaian di tingkat kebijakan dan praktis sekaligus tantangan yang dihadapi. Kami mengakui bahwa upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri tanpa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, maupun masyarakat.

Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kami menyoroti kontribusi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam Civil 20 (C20). Kami merasa terhormat ditunjuk menjadi pimpinan C20, suatu platform yang mewakili organisasi masyarakat sipil di tingkat global. Peran utama C20 adalah mewakili suara dan kepentingan masyarakat sipil dalam pembahasan dan perumusan kebijakan di tingkat Government 20 (G20). C20 berusaha memengaruhi agenda G20 di bawah Presidensi Pemerintah Indonesia dengan memperjuangkan isu-isu kunci yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan ketimpangan.

Dalam Pertemuan G20 yang diadakan di Indonesia, C20 memiliki beberapa peran penting. *Pertama, **advokasi isu-isu masyarakat sipil.*** C20 menyampaikan aspirasi dan perhatian masyarakat sipil kepada para pemimpin G20 melalui pertemuan, konsultasi, dan rekomendasi kebijakan. C20 berusaha mendorong inklusi, partisipasi, dan keadilan dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang dibahas oleh G20. *Kedua, **dialog dengan para pemimpin G20.*** C20 berinteraksi langsung dengan para pemimpin G20, baik melalui pertemuan resmi maupun forum dialog terbuka. C20 memberikan masukan dan saran langsung kepada para pemimpin mengenai kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat sipil.

*Ketiga, **penyusunan communique dan rekomendasi kebijakan.*** C20 mengkoordinasikan dan menyusun rekomendasi kebijakan yang disusun kelompok kerja yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sipil. Rekomendasi ini disusun berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil di berbagai negara, termasuk negara-negara yang bukan menjadi anggota G20, dan menyediakan panduan bagi kebijakan G20 yang lebih inklusif dan berkelanjutan. *Keempat, **pengawasan dan evaluasi.*** C20 memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan G20 serta memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses tersebut. C20 memberikan umpan balik kritis terhadap kebijakan dan mendorong akuntabilitas G20 terhadap masyarakat sipil.

Program Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kami percaya bahwa demokrasi yang kuat dan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Kami menyoroti peran INFID dalam mencegah penyebaran ideologi radikalisme berkekerasan dan sekaligus menangani individu yang terpapar baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ideologi ini. Kami bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, terutama PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam mempromosikan Islam yang damai baik di tingkat nasional maupun internasional. Bersama Asosiasi Guru Pelajaran Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan Jaringan Gusdurian, kami

memperkenalkan kepada orang muda tentang bahaya radikalisme sekaligus mempromosikan keberagaman dan toleransi. Kami juga terlibat dalam penyusunan alat penilaian risiko (*risk assessment tools/RAT*) untuk penanganan deportasi dan kembali. Selain itu, bersama Fatayat NU dan Institut Perempuan, kami berhasil mendorong penyusunan rencana aksi daerah (RAD) untuk pencegahan radikalisme berkekerasan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Program Pengurangan Ketimpangan. Pengurangan ketimpangan merupakan komponen integral dari upaya kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kami memahami bahwa ketimpangan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dapat menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami menyoroti hasil kajian INFID yang selanjutnya diolah menjadi dua kertas kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan presiden dan peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban (DBK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada April 2022.

Kelembagaan. Kami menyoroti upaya penguatan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan organisasi INFID di tengah tren penurunan jumlah dana pembangunan yang berlangsung sejak tahun 2019 pada saat status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah tinggi dan berlanjut pada saat pandemi COVID-19. Ada empat aspek yang tengah diperbaiki, yaitu komunikasi dan *branding*; kapasitas staf; pengembangan organisasi anggota INFID; dan keberlanjutan finansial. Donor lain dan mitra kerja juga berperan dalam penguatan ini melalui kegiatan pengembangan kapasitas yang melekat pada proyek. Upaya untuk mengarusutamakan *gender equality, disability, and social inclusion* (GEDSI), misalnya, tidak lepas dari intervensi ini. Kami percaya organisasi harus terus melakukan perubahan dan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang juga terus berubah.

Tahun 2022 adalah tahun istimewa bagi INFID dan anggota karena disepakatinya penyelenggaraan Sidang Umum Anggota (SUA) pada Juli 2022. Untuk menyambutnya kami melakukan serangkaian kegiatan di Jakarta, dimulai dari pra-konferensi dan dilanjutkan dengan konferensi yang melibatkan anggota dan para pemangku kepentingan. Kami membawa hasil dari kedua kegiatan ini beserta rekomendasinya untuk dibahas pada kegiatan puncak, yaitu sidang umum anggota. Ada tiga rekomendasi dari sidang umum anggota ini, yaitu politik, kelembagaan, dan program. Setelah itu, kami menyelenggarakan lokakarya perencanaan strategis di Yogyakarta. Rencana strategis yang dihasilkan menjadi pegangan bagi INFID untuk bekerja hingga empat tahun ke depan.

INFID menyampaikan terima kasih kepada media massa di tingkat lokal dan nasional yang telah meliput kegiatan INFID dan sekaligus meneruskan pesan advokasi dan kampanye kepada para pemangku kepentingan. Namun, INFID juga bekerja sendiri dalam mendekati audiens, terutama orang muda, dan menyampaikan pesan yang relevan bagi mereka lewat media sosial yang populer bagi mereka.

Tentu saja, masih ada pekerjaan rumah bagi INFID. Dalam menjalankan peran kerjanya melalui media, INFID perlu terus melakukan investasi, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kompetensi yang memadai, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan strategi komunikasi untuk memberikan sumbangan pada perubahan sosial dan politik ke arah yang lebih baik.

Akhir kata, kami berharap laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan komitmen INFID dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, memperkuat demokrasi, dan mempromosikan HAM. Kami berterima kasih atas dukungan dan kerja sama dari semua mitra dan para pemangku kepentingan yang telah mengiringi perjalanan kami.

INFID DALAM ANGKA

USIA 37 TAHUN

175 Kegiatan sepanjang 2022

Program SDGs:
39 Kegiatan

Program Pengurangan Ketimpangan:
29 Kegiatan

Program HAM:
97 Kegiatan
(Tangguh, Graisea, Harmoni, Prevent)

**Kinerja Portofolio
Pendanaan 2022 =
30 Miliar**

MITRA PEMBANGUNAN

- Kedutaan Besar Kerajaan Belanda
- National Endowment for Democracy (NED)
- Ford Foundation
- Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands - Global Center
- German Embassy
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- USAID - Wahana Visi Indonesia (WVI)
- USAID - Harmoni
- OXFAM
- Yayasan Kurawal
- United Nations Development Programme (UNDP)
- World Resource Institute - Low Carbon Development
- Indonesia (WRI LCDI)
- Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC)
- Action for Sustainable Development (A4SD)
- Perkumpulan OHANA Indonesia
- Asia Democracy Network (ADN)

STRUKTUR LEMBAGA

3

Dewan
Pengawas

7

Dewan
Pengurus

5

Penasihat
Ahli

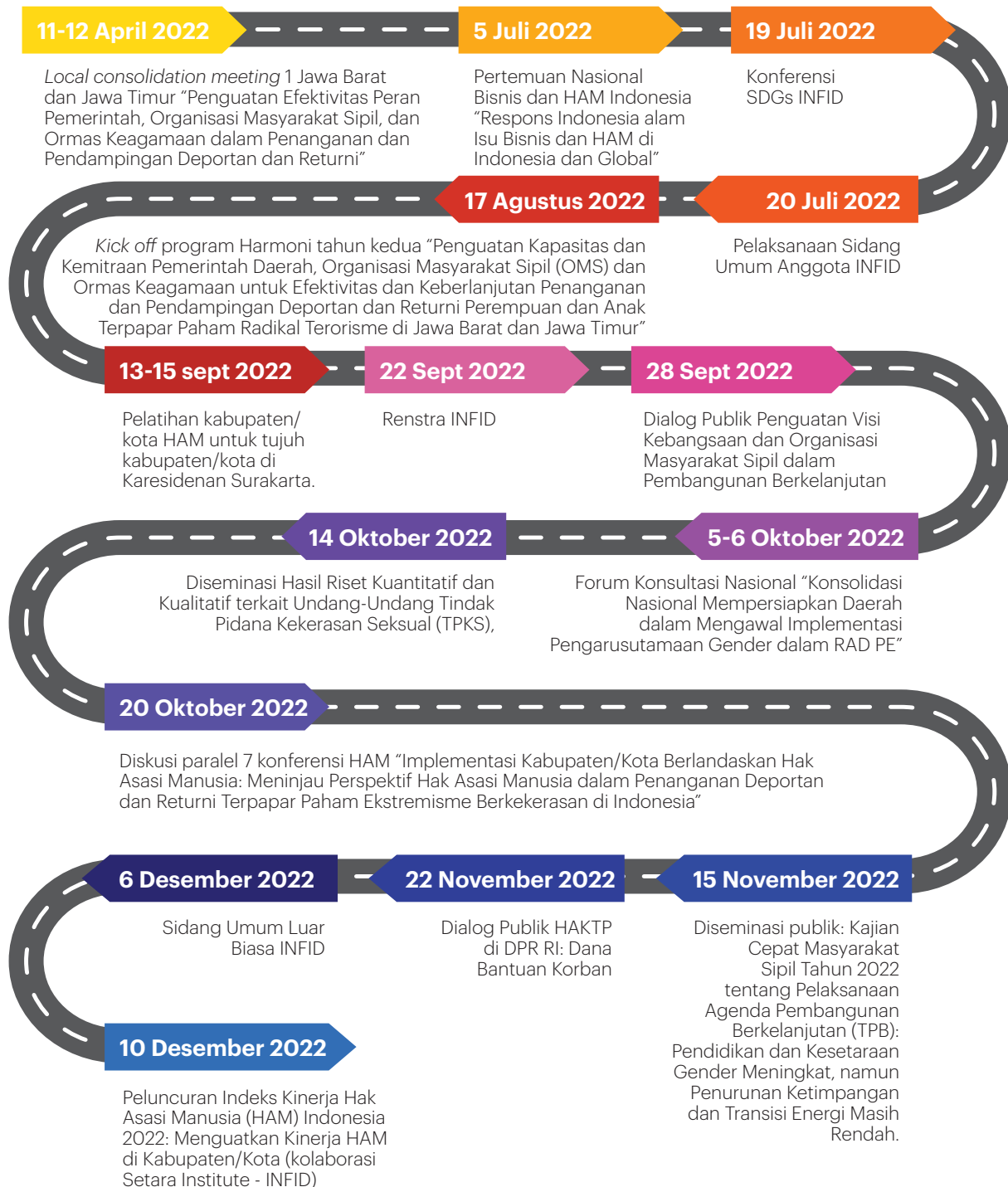
25

Staf

Program	Mitra	Laporan Riset	Liputan	Publikasi Buku	Pelatihan	Kertas Kerja	Webinar / Seminar
HAM dan Demokrasi	20	7	218	2	12	2	31
Penurunan Ketimpangan	2	2	15	0	2	2	12
SDGs	20	7	68	2	0	2	9
TOTAL	42	16	301	4	14	6	52



KEGIATAN BESAR INFID



TESTIMONI JARINGAN INFID



Dr. Livia Istania DF Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI)

Selamat kepada INFID atas kinerjanya pada tahun 2022 yang luar biasa. Beberapa kali INFID telah meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menjadi kontributor dalam beberapa kegiatan dalam upaya mengadvokasi kebijakan berbasis bukti khususnya untuk UU TPKS. Pertama, dalam focus group discussion (FGD) terkait UU TPKS. Kedua, menjadi salah satu narasumber pada desiminasi dua riset INFID: studi kualitatif tentang operasionalisasi UU TPKS, dan studi kuantitatif tentang persepsi warga akan adanya UU TPKS. Ketiga, menjadi peer reviewer untuk kertas kebijakan terkait dana bantuan korban (DBK). Keempat, menjadi narasumber dalam kegiatan Aksi Parlemen dalam Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) untuk tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, membahas tema dana bantuan korban.

Saya berharap kinerja INFID ini tetap diteruskan untuk tahun 2023, dan selanjutnya INFID tetap bergerilya dalam membantu pembangunan Indonesia khususnya terkait dengan UU TPKS di mana peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) dan turunannya harus sudah siap sehingga dapat disahkan pada tahun depan, 2024. Saya mewakili pimpinan LPSK mendukung kerja-kerja INFID sebagai organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk pembangunan Indonesia. Selamat berjuang INFID. Kami tunggu untuk kerja sama berikutnya. Terima kasih.



Agustina Apaseray, Koordinator Forum Kota Sehat (FKS) Kampung Holtekam, Mitra Kerja Proyek KOLABORASI

Pendapat saya tentang apa yang telah kami dapatkan dari INFID, yakni informasi dan pengetahuan. Dengan demikian, dalam pembentukan multi-stakeholder forum (MSF) ke depan ini nanti sangat bermanfaat untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam pemantauan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan ke depan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat bisa sejahtera melalui pendidikannya, kesehatannya, dan perekonomiannya melalui dana otonomi khusus dan juga dana lain.



John Julius Boekorsjom, Fungsional Perencana Bappeda Papua, Mitra Kerja Proyek KOLABORASI

Tiga kali saya mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh INFID untuk menginisiasi pembentukan multi-stakeholder forum. Saya menganggap keberadaan forum partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kepentingan masyarakat bisa terangkum dalam perencanaan pembangunan. Ini semakin mengerucut karena forum ini akan mengambil tema kesehatan. Saya berharap 20 tahun ke depan orang asli Papua (OAP) menjadi sehat.



Tongam Panggabean, Direktur Bakumsu, Anggota INFID

Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) mengapresiasi beberapa inisiatif yang telah ditempuh oleh INFID dalam rangka memperkuat dialog dan kemitraan terutama di antara berbagai pemangku kepentingan pembangunan dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Salah satunya adalah Forum Mitra Pembangunan INFID atau INFID Development Partner Meeting (IDPM) yang telah diadakan pada Maret 2023 yang lalu. Kegiatan ini memungkinkan Bakumsu untuk berbagi informasi mengenai isu-isu strategis di sektor sumber daya alam dan pembangunan yang berbasis pemenuhan hak-hak kelompok rentan, terutama masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani, dan keberlanjutan lingkungan dari perspektif lokal.

Dengan metode yang dialogis dan partisipatif, bersama dengan INFID, Bakumsu juga dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan advokasi di sektor sumber daya alam serta merumuskan peluang-peluang kerja sama dan kolaborasi pada masa yang akan datang. Bakumsu meyakini bahwa forum sejenis ini sangat relevan dan strategis terutama bagi anggota INFID yang bekerja di ranah akar rumput, sehingga sinergi advokasi di level lokal, nasional, dan internasional dapat lebih efektif. Selain itu, percepatan penyelesaian persoalan struktural di sektor SDA dapat diwujudkan terutama berdasarkan pendekatan lintas dan multi-sektoral.



Sugiarto Arif Santoso, Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Mitra Kerja Proyek Dana Abadi

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bangga bergabung menjadi anggota INFID. Sangat besar peran INFID dalam memfasilitasi kepentingan anggotanya seperti advokasi kebijakan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil (OMS), melakukan kajian Sustainable Development Goals (SDGs), mengaktifasi pertemuan anggota dengan mitra pembangunan, dan konsisten dalam memperkuat tata kelola internal organisasi. Di sisi lain, INFID terus melakukan pencerahan publik dengan mengadakan diskusi-diskusi terkait hak-hak warga, nilai dan pendekatan inklusi, serta tema-tema terkait hak asasi manusia yang lain. INFID telah berhasil membawa wacana hak-hak sosial dan ekonomi warga dengan memfasilitasi kegiatan internasional C20 yang merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia.

Kami berharap peran-peran INFID dalam memperkuat ekosistem organisasi masyarakat sipil dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, INFID juga terus aktif dalam melakukan tugasnya terkait pendidikan politik bagi warga. Dengan demikian, kerja-kerja INFID dapat terus relevan dengan kebutuhan anggota dan cita-cita INFID dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis, setara, adil, dan damai akan terlaksana di kemudian hari.



Siti Mazdafiah, Direktur Savy Amira, Mitra Kerja Proyek HARMONI

Terima kasih sudah sangat profesional, pada administrasi, komunikasi, dukungan materi dan informasi, pemberian masukan pada penulisan kajian. Berkat INFID, saya lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi dengan Komnas Perempuan untuk advokasi pemenuhan hak korban bom gereja di Surabaya pada tahun 2018.

Terkait program, INFID telah menjadi motor yang sangat efektif dalam menyadarkan berbagai pihak tentang pentingnya menggarap isu deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportan dan returni perempuan dan anak, serta serius bekerja pada isu ini. Sayang sekali, sudah beberapa waktu berlalu pasca INFID berpamitan, belum ada kabar lanjutan terkait Peraturan Gubernur tentang RAD PE.

Harapan saya, INFID dapat melanjutkan program deradikalisasi dan rehabilitasi sosial deportan dan returni, bersinergi dengan program pemenuhan hak-hak korban terorisme serta menciptakan lingkungan sosial yang damai, kondusif bagi toleransi, dan saling menghargai satu sama lain.

Pilihan INFID untuk bermitra dengan Fatayat merupakan keputusan yang sangat strategis mengingat gubernur yang saat ini berkuasa merupakan alumni Fatayat dan dari organisasi NU. Harapan saya, INFID dapat bermitra dengan melibatkan organisasi umat beragama selain muslim secara setara. Karena ekstremisme berbasis kekerasan juga exist di kelompok beragama selain Islam.



Kalis Mardi Asih, Penulis dan Aktivis Toleransi, Kelas Kalis, Mitra Kerja Proyek PREVENT

Kinerja INFID semakin oke karena terus melibatkan inisiatif-inisiatif dari kelompok yang lebih luas. Dalam Projectku (Kelas Menulis Kreatif untuk Perdamaian #MencatatToleransiMerekamPerdamaian) kelompok yang semakin terlibat adalah anak muda/pelajar.

Harapan: Upaya melibatkan kelompok yang lebih luas, seperti anak muda ataupun jaringan lintas iman, harus berbasis data terkait kebutuhan dan isu spesifik sehingga tepat sasaran.



Prof. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Tenaga Ahli Utama Deputy V, Kantor Staf Presiden, Mitra Kerja Proyek Kabupaten/Kota HAM

Festival HAM yang dilaksanakan Komnas HAM, INFID, dan didukung Kantor Staf Presiden RI merupakan suatu model kolaboratif yang didorong oleh Presiden agar suatu isu dan program memiliki ownership yang kokoh.

Oleh sebab itu, kolaborasi ini perlu direplikasi dan diperbanyak untuk isu dan program lain. Ownership yang kokoh dapat memastikan keberlangsungannya.



Qanita Qamarunisa, Alumni Youth Camp “Muda Toleran” 2022 dan Perempuan Ahmadiyah, Proyek PREVENT

Salah satu rangkaian kegiatan dari program Support to Youth yang menjadi gebrakan besar INFID dalam mendorong pemajuan kapasitas anak muda dalam isu-isu toleransi, keberagaman, dan kebebasan beragama di Indonesia adalah kegiatan Youth Camp bertema “Muda Toleran”.

Menghadirkan peserta yang memiliki karakteristik beragam, dari sisi etnis, agama, gender, dan orientasi seksual, telah memberikan pengalaman baik kepada saya akan contoh bentuk yang ideal sebuah masyarakat Indonesia yang memiliki keterbukaan terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya.

Melalui Youth Camp, INFID telah menyediakan lingkungan dan ruang-ruang pertemuan yang sehat dan mendukung pemuda dalam mengaktualisasi diri, berekspresi, berkreasi, dan bertumbuh bersama sebagai generasi yang damai, sehingga banyak pengalaman dan best practice yang bisa diserap dan diimplementasi di lingkungan dan komunitas.

Selain itu, saya menilai INFID telah membuka dan mengembangkan kesempatan melalui berbagai upaya dialog dan kolaborasi lintas generasi dengan melibatkan alumni Youth Camp dalam lokakarya monitoring dan evaluasi sebagai sesama manusia yang setara dan berpotensi kreatif untuk berpartisipasi aktif di ruang publik dalam mewujudkan keamanan bersama dan perdamaian tanpa adanya subordinasi dan stigma atas identitas kepemudaan.

Selamat untuk INFID. Saya sangat mendukung program-program INFID selanjutnya agar dapat terus berbagi manfaat untuk masyarakat Indonesia terkhusus anak muda.

Saya sangat berharap semoga pada tahun mendatang INFID dapat terus bekerja sama dalam mendorong dan memfasilitasi pemuda baik secara individu, kelompok, maupun lembaga/organisasi dalam berbagai inisiasi dan kerja-kerja dalam memajukan demokrasi, toleransi, partisipasi, pluralisme, dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas



**Dwi Rubyanti
Khalifah**
Chair



Henrek Lokra
Member



Wahyu Susilo
Member

Dewan Pengurus



Khairani
Chair



**Muhamad
Isnur**
Vice Chair



**Dina
Mariana**
Secretary



Listyowati
Treasury



**Sarah Lery
Mboeik**
Member



**Moh.
Maskurudin
Hafid**
Member



Alita Karen
Member

Penasihat Ahli



**Zumrotin K.
Susilo**



M. A.S. Hikam



**Michael Bobby
Hoelman**



Bagus Takwin



**Aris Arif
Mundayat**

Sekretariat

Sugeng Bahagijo	<i>Executive Director</i>	Ari Wibowo	<i>Associate Researcher Program SDGs</i>
Jim Matuli	<i>Finance and HRD Director</i>	Intan Bedisa	<i>Communication and Digital Officer</i>
Aditiana Dewi Eridani	<i>Senior Program Officer on Partnership & Membership</i>	Dwinda Nur Oceani	<i>Creative Communication Officer</i>
Abdul Waidl	<i>Senior Program Officer on Human Rights and Democracy</i>	Bintang Putra	<i>Program Support Preventing Violent-Extremism</i>
Bona Tua P.P. (Bona)	<i>Senior Program Officer on Sustainable Development Goals/ SDGs</i>	Muhammad Naziful Haq	<i>Program Support Preventing Violent-Extremism dan Pengurangan Ketimpangan</i>
Rizka Antika	<i>Program Officer on Promoting Tolerance and Respect for Diversity</i>	Veronica Purwaningsih	<i>Field Coordinator Papua and Papua Barat</i>
Alyaa Nabiilah Zuhroh	<i>Program Officer on Human Rights & Democracy</i>	Lolita Limariana	<i>Administration Papua dan Papua Barat</i>
Sanita Rini	<i>Program Officer on Preventing Violent Extremism/PVE</i>	Intan Kusumaning Tiyas	<i>Field Officer Papua Barat</i>
Syafira Khairani	<i>Program Assistant on Preventing Violent Extremism/PVE</i>	Jackson Robinson	<i>Program Assistant</i>
Angelika Fortuna Dewi Rusdy	<i>Program Officer SDGs</i>	Ima Desiyanthi	<i>Finance Manager</i>
Denisa Kawuryan	<i>Program Officer SDGs</i>	Misnawati Syamsir	<i>Tax Specialist</i>
Rinto Leonardo Siahaan	<i>Program Assistant SDGs</i>	Rini Widyastuti	<i>Finance Officer</i>
Grace Joanessa K. Putri	<i>Program Assistant SDGs</i>	Fadil Kuntjara	<i>Finance Officer</i>
Hendrikus Rizky V. Putro	<i>Program Assistant on Human Rights & Democracy</i>	Florence	<i>HRD Manager</i>
S.R.A. Desyana	<i>Program Associate</i>	Suwarno	<i>IT & Procurement Manager</i>
Gesia Nurlita	<i>Program Support SUA dan SFGs (C20)</i>	Sabarno	<i>Operation Officer</i>
Purnama Adil Marata	<i>Senior Associate MEL & Development Program</i>	Wasiton	<i>Assistant Operation Officer</i>



BAB I

PROFIL 37 TAHUN PERJUANGAN INFID

Tahun 2022 adalah tahun yang padat dengan agenda bagi INFID. Selain kegiatan rutin, Sekretariat INFID menyelenggarakan rangkaian sidang umum anggota (SUA) dan rencana strategis (renstra). Sidang umum anggota (Pasal 25 Anggaran Dasar/AD) merupakan mandat yang harus dilaksanakan setiap empat tahun sekali (Pasal 26 AD) oleh Sekretariat. Badan Pengurus dan Badan Pengawas memutuskan SUA dilaksanakan pada Juli 2022, dan sebelumnya didahului dengan penyelenggaraan survei anggota di tengah pandemi, pra-konferensi, dan konferensi yang diselenggarakan Sekretariat INFID.

Untuk kepentingan teknis, Badan Pengurus dan Sekretariat INFID menyelenggarakan lokakarya "Menuju Konferensi dan Sidang Umum Anggota INFID 2022" pada 14-15 Februari 2022 untuk mendapatkan gagasan dari beberapa narasumber mengenai analisis konteks, HAM dan demokrasi, ekonomi pembangunan dan politik, keberlanjutan lembaga, dan penguatan gerakan masyarakat sipil dan memutuskan tema yang akan diusung pada konferensi dan SUA.

Pra-konferensi yang dilakukan secara daring pada 11-14 Juli 2022 didesain untuk: 1) Memetakan tantangan, peluang, dan strategi

INFID; 2) Menyediakan ruang bagi anggota, mitra INFID, dan masyarakat umum untuk berbagi pengalaman dan strategi advokasi. Adapun empat tema yang dibahas, yaitu 1) Eskalasi Pelanggaran HAM Dampak dari Digitalisasi Demokrasi?; 2) Menilik Kembali RUU untuk Rakyat; 3) Kabar Terbaru HAM dari Sektor Bisnis di Indonesia; 4) Sikap dan Pandangan Generasi Z dan Milenial di Indonesia terhadap Toleransi, Kebhinekaan, dan Kebebasan Beragama. Semua empat tema yang didiskusikan mendapatkan liputan dari media massa, termasuk *Kompas* dan *CNN Indonesia*.

Pra-konferensi menghadirkan anggota INFID sebagai peserta. Kegiatan ini memberikan stimulus terhadap langkah-langkah ke depan yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan dalam pemajuan demokrasi dan HAM; dan pengurangan ketimpangan sosial.

Kegiatan ini mendapatkan 47 liputan media. Pra-konferensi ini juga disiarkan secara langsung melalui *live streaming Youtube INFID TV*, Facebook, dan beberapa *postingan update* kegiatan melalui laman sosial media Instagram dan Twitter.

Konferensi didesain untuk, pertama, memperoleh pemahaman tentang tren dan

tantangan pembangunan berkelanjutan dan HAM; regresi demokrasi yang terus menurun; praktik ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus terjadi; serta situasi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. *Kedua*, merumuskan strategi dan memperkuat jejaring kerja kolaboratif, organisasi, dan kekuatan masyarakat sipil dalam agenda transformasi Indonesia. *Ketiga*, menyerap gagasan tentang apa dan bagaimana langkah perubahan serta perbaikan yang sebaiknya ditempuh oleh INFID untuk mendorong kemajuan organisasi dan anggota ke depan.

Konferensi TPB yang diselenggarakan pada 19 Juli 2022 membahas beberapa tema kunci yang menjadi fokus INFID, yakni 1) Sesi Pleno I “Tantangan HAM di Indonesia dan Global”; 2) Sesi Pleno II “Tantangan Regresi Demokrasi”; 3) Sesi Pleno III “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Ketimpangan dan Peran Masyarakat Sipil”; 4) Sesi Pleno IV “Membangun dan Memastikan Keberlanjutan Masyarakat Sipil”. Kegiatan konferensi ini diselenggarakan secara *offline* di Hotel Arosa, Jakarta Selatan, yang dihadiri 186 peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh tamu undangan yang merupakan perwakilan Kedutaan Inggris, Kedutaan Kanada, Korea International Cooperation Agency (KOICA), Kantor Staf Presiden, Bappeda Kota Batam, Unika Widya Karya Malang.

Kegiatan Konferensi TPB dihadiri 186 peserta dengan rincian 98 perempuan dan 88 laki-laki. Seperti yang diharapkan, konferensi ini dapat memberikan pemahaman bagi peserta tentang tren dan tantangan terkait dengan tiga program utama INFID, yaitu Demokrasi dan HAM, Penurunan Ketimpangan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari pemahaman ini peserta selanjutnya mampu merumuskan langkah perubahan serta perbaikan yang sebaiknya ditempuh oleh INFID untuk

mendorong kemajuan-kemajuan organisasi dan anggota INFID ke depan.

Sesuai dengan mandat AD INFID Bagian XI Pasal 26, SUA adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang diikuti oleh anggota perkumpulan INFID. SUA yang diselenggarakan pada 21 Juli 2022 dihadiri oleh 68 OMS dan individu anggota. SUA merupakan kegiatan empat tahun sekali. SUA bertujuan melaporkan pertanggungjawaban Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas periode 2018-2022; melaksanakan pemilihan dan pelantikan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas baru; dan menetapkan garis-garis besar kebijakan perkumpulan. SUA terdiri dari rangkaian kegiatan: 1) Sidang 1 membahas tata tertib dan pemilihan pimpinan sidang tetap; 2) Sidang 2 menetapkan kuorum dan agenda sidang; 3) Sidang 3 membahas laporan pertanggungjawaban; 4) Sidang 4 merupakan sidang komisi; 5) Sidang 5 membahas pemilihan dan pelantikan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas; dan 6) Sidang 6 merupakan penutupan.

Sidang komisi dibagi menjadi tiga, yakni 1) komisi kelembagaan, 2) komisi program, dan 3) komisi politik dan isu strategis. Anggota diperkenankan memilih sendiri untuk masuk ke dalam sidang komisi yang dikehendaki.

Sidang komisi kelembagaan membahas: 1) AD/ART; 2) Pengesahan dan pemberhentian anggota INFID yang tidak aktif; 3) Penetapan dan pengesahan 18 anggota INFID dan satu Individu; 4) Kewenangan Dewan Pengawas, pengelolaan dan keterlibatan anggota, serta 5) evaluasi kelembagaan.

Pembahasan AD/ART menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah kewenangan Dewan Pengawas. Rekomendasi lain mengenai tata cara mekanisme rapat



pengambilan keputusan dalam rapat pengawas, pengurus, dan lain-lain; membentuk tim perumus untuk menyempurnakan AD/ART; dan menyelenggarakan sidang umum luar biasa untuk mengesahkan perubahan AD/ART yang dimaksud pada poin e maksimal tiga bulan setelah Sidang Umum 2022.

Selain memberhentikan anggota yang tidak aktif, komisi ini juga merekomendasikan pengesahan 18 organisasi dan satu individu sebagai anggota baru. Untuk menghindari ketidakaktifan anggota INFID, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi anggota, di antaranya dengan: 1) Pemetaan anggota berbasis isu dan agenda advokasi, serta membentuk atau mengaktifkan kelompok kerja (*working group*) yang bersifat *ad hoc* untuk melaksanakan agenda advokasi; dan 2) Memfasilitasi kerja sama anggota dan lebih proaktif membangun komunikasi dengan anggota, tanpa mengambil alih isu-isu yang diperjuangkan anggota INFID.

Sidang komisi program membahas: 1) Menumbuhkan kesadaran nilai HAM dan demokrasi; 2) TPB; 3) Ketimpangan sosial dan ketimpangan gender; 4) Dialog kebijakan pemenuhan HAM, keterlibatan, dan advokasi INFID dalam program anggota.

Selain memberikan masukan pada program HAM dan Demokrasi; Pengurangan Ketimpangan; dan TPB, Komisi Program juga memberikan masukan terkait dengan keterlibatan anggota INFID dalam mengelola program supaya ada peningkatan inklusivitas dalam pelaksanaan program dan memilah program menjadi dua, yaitu program fasilitasi anggota dan program yang dipimpin oleh Sekretariat INFID. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana mekanisme koordinasi agar tidak terjadi duplikasi program antara INFID dan anggota. Selain itu, Komisi juga mengusulkan perlu ada sub-sub pengurus agar fungsi Dewan Pengurus berjalan. Contoh yang muncul dalam usulan ini adalah pembentukan pengurus program dan pengurus anggota.



Komisi Politik membahas empat topik, yaitu 1) Penelitian dan kajian (publikasi dan informasi kepada anggota); 2) Kerja sama anggota dan antar-lembaga dalam advokasi kebijakan; 3) Posisi organisasi terhadap situasi terkini; dan 4) Rekomendasi politik.

Dalam pembahasan mengenai penelitian dan kajian, Komisi Politik menilai INFID memiliki beberapa kajian yang berdampak dan mudah dijangkau media. Namun, yang melakukan penelitian dan kajian tersebut bukan anggota INFID. INFID didorong untuk mengikutsertakan anggotanya untuk melakukan kerja penelitian. Selain itu, INFID perlu untuk membentuk forum yang mempertemukan hasil penelitian dan kajian para anggota, sehingga hasil dapat digunakan bersama anggota yang lain. Selain itu, penelitian kolaboratif yang dimotori INFID

perlu didorong, sehingga tidak ada anggota INFID yang merasa ditinggalkan.

Dalam pembahasan mengenai kerja sama anggota dan antar-lembaga dalam advokasi kebijakan ini, perlu adanya pembagian peran kolaborasi INFID dan anggota. Atas alasan inilah, INFID harus memiliki pedoman untuk advokasi bersama dengan anggota. INFID juga harus lebih proaktif dalam memfasilitasi kerja sama anggota. INFID perlu melakukan pemetaan anggota berbasis isu dan agenda advokasi, serta mengaktifkan kelompok kerja bersifat *ad hoc* dalam melakukan agenda advokasi.

Dalam pembahasan mengenai posisi organisasi terhadap situasi aktual, termasuk situasi politik, Komisi Politik menyusun delapan rekomendasi bagi pemerintah, legislatif, dan partai politik.

Rekomendasinya adalah sebagai berikut.

- 1) INFID merekomendasi kepada pemerintah dan DPR agar menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Masyarakat Adat dengan proses yang partisipatif;
- 2) INFID merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR agar tidak gegabah membahas dan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan berujung pada penolakan dari masyarakat dan uji materi di Mahkamah Konstitusi;
- 3) INFID menyikapi kebijakan pemerintah tentang proyek strategis nasional yang berdampak negatif terhadap HAM dan Lingkungan Hidup;
- 4) INFID merekomendasikan kepada pemerintah, DPR, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu damai dan berintegritas serta mencegah penggunaan politik identitas;
- 5) INFID mendorong pemerintah untuk menjamin ruang kebebasan sipil;
- 6) INFID mengawal dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan TPB secara efektif dan inklusif termasuk mengintegrasikan dalam RPJMN dan berbagai kebijakan;
- 7) INFID mendorong untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan gender dalam semua program dan kebijakan termasuk memastikan pelaksanaan UU TPPKS dan aturan turunannya;
- 8) INFID mendorong pemerintah menerapkan inklusi sosial dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok rentan.

Komisi Politik juga menyusun rekomendasi bagi INFID terkait dengan penelitian dan kajian dengan perincian sebagai berikut.

- 1) INFID harus memastikan tidak satu pun anggota ditinggalkan dalam melakukan penelitian, kajian, dan advokasi;
- 2) Isu strategis dipilih INFID berdasarkan penelitian dan kajian yang dalam pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan anggota dalam rangka memperkuat konsolidasi anggota dan masyarakat sipil untuk memperbesar dampak advokasi;
- 3) Dalam rangka advokasi dan penguatan anggota, konsolidasi masyarakat sipil dan advokasi, INFID memperkuat keterlibatan anggota di daerah, dan melakukan pengelolaan pengetahuan, termasuk mengelola pengalaman terbaik (*best practice*) yang dilakukan oleh anggota di tingkat nasional dan daerah;
- 4) INFID mengembangkan sinergi antara organisasi nasional dan organisasi daerah, mengembangkan isu bersama dan melakukan advokasi perubahan kebijakan agar rumusan usulan perubahan kebijakan yang diusulkan INFID diadopsi dalam perubahan kebijakan pengambil keputusan;
- 5) INFID harus menggunakan hasil-hasil risetnya sebagai basis argumen dalam melakukan advokasi dan mendorong pengambil kebijakan menggunakan hasil riset INFID sebagai rujukan kebijakan.

Kegiatan lokakarya untuk penyusunan rencana strategis bagi INFID yang diselenggarakan pada 20-22 September 2022 di Yogyakarta. Acara dihadiri oleh tujuh Dewan Pengurus, Ketua Dewan Pengawas, dan 18 staf Sekretariat. Dokumen rencana strategis, terkait dengan program, kelembagaan dan keuangan, yang dihasilkan menjadi panduan kerja Sekretariat, dan sebagai rujukan Badan Pengurus serta Badan Pengawas untuk menilai dan mengukur kinerja INFID dalam periode tersebut.



BAB II

PROGRAM INFID 2022

Program HAM dan Demokrasi

Freedom House, yang menekankan pada hak politik dan kebebasan sipil, menyebut Indonesia sebagai negara yang dianggap *partly free* dan menduduki peringkat 59 dari 100 negara pada tahun 2022. Indonesia menduduki posisi sama pada tahun 2021. Kendati mengalami penurunan kualitas, peringkat Indonesia tidak mengalami perubahan. Ini terjadi karena kemunduran demokrasi juga terjadi secara global.

Economist Intelligence Unit (EIU) menyebut peringkat Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54 kendati skor yang diperoleh tidak mengalami perubahan pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. EIU yang bicara juga tentang peran pemerintah selain hak politik dan kebebasan sipil, menyatakan Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Lagi-lagi, Indonesia kembali masuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*).

Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok

“cacat” ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti-kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

INFID dan Setara Institute menyoroti kebebasan sipil dasar dalam laporan Indeks Kinerja HAM di Indonesia pada tahun 2022 dan menyatakan terjadi penurunan pada indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat sebesar 0,1 pada 2022 dibanding tahun sebelumnya. Skor pada indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator yang selalu rendah setiap tahunnya.

Ini persis terjadi saat pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan di area kebijakan dan regulasi untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat. RPJMN 2020-2024, dokumen kebijakan utama Indonesia, telah menyatakan peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu strategi untuk memperkuat proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Bahkan, pada periode sebelumnya, pemerintah juga membuka ruang baru bagi OMS untuk terlibat dalam proses pembangunan. Swakelola Tipe III adalah salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang mulai

diberlakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara pengadaan ini memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan barang/jasanya melalui OMS dengan pembiayaan dari APBN atau APBD. Lebih jauh, pada saat pandemi COVID-19 Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 440/5538/SJ memberikan ruang bagi lembaga swadaya masyarakat untuk mengakses dana demi percepatan penanganan pandemi.

Konteks, Peran, dan Kontribusi INFID

Jajak Pendapat Litbang *Kompas* pada tahun 2022 mengungkapkan, mayoritas responden percaya masyarakat Indonesia telah menjunjung tinggi toleransi. Jajak pendapat itu juga mengungkap nilai toleransi pada warga dengan usia muda lebih besar.

Dari survei yang dilakukan pada tahun 2021, INFID menemukan bahwa sebagian besar responden dari generasi Z dan milenial memiliki sikap positif atau mendukung inklusivitas ketika berhubungan dengan warga yang berbeda agama dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, ataupun ketika menjalin pertemanan. Ketidaksetujuan mereka muncul pada pemberlakuan pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelompok agama. Waau demikian, ketika dibatasi dalam ranah beragama yang lebih khusus, ditemukan masih banyak responden yang bersifat eksklusif dalam beragama dan berinteraksi dengan orang-orang yang berpaham keagamaan yang lain.

Persepsi orang muda menimbulkan optimisme baru di tengah tindakan intoleran masih muncul di tengah masyarakat. Setara Institute merilis

laporan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada 2022. Dalam laporan tersebut, tercatat 175 peristiwa pelanggaran KBB dengan 333 tindakan di Indonesia. Angka ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan temuan pada tahun 2021, yakni 171 peristiwa dengan 318 tindakan pelanggaran KBB. 168 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sedangkan 165 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. Pada tahun 2022 baik aktor negara maupun non-negara melakukan tindakan yang sama, yaitu masing-masing 168 tindakan.

Penyebaran radikalisme juga terjadi di ruang publik dunia maya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikal selama 2022. Dari beberapa platform media sosial, Facebook menjadi yang paling banyak. Untuk Facebook ada 167 akun, WhatsApp 156 kontak atau grup, Telegram 119 *channel* atau grup, Twitter 85 akun atau grup, Instagram 50 akun, YouTube 24 akun atau grup, situs web 14 *link* dan yang lain satu akun grup.

Ada pergeseran peran dari ruang domestik menuju ruang publik. Di ruang domestik, perempuan menjadi aktor kunci dalam penyebaran radikalisme ini. Budaya patriarkis mendorong kemunculan asumsi perempuan selalu hanya bersifat pasif dalam konteks radikalisme. Tetapi, realitas di lapangan menunjukkan mereka memiliki peran penting.

Di ruang domestik, secara tradisional mereka berperan dalam mereproduksi nilai-nilai dan mentransfer ideologi radikal kepada anak-anak dan keluarga. Namun, seiring dengan kemunculan media sosial yang membuat batas ruang domestik dan publik semakin

tipis, mereka memainkan peran utama sebagai dalang propaganda. Lebih buruk lagi, mereka menjadi kombatan yang siap melakukan aksi bom bunuh diri. Aksi bom bunuh diri yang melibatkan perempuan terjadi ketika semakin banyak teroris laki-laki ditangkap aparat keamanan. Perkembangan jumlah tahanan dan narapidana (napi) teroris perempuan yang meningkat merefleksikan semakin tampak peran perempuan di ruang publik.

INFID melakukan intervensi baik di tingkat pencegahan maupun penanganan ekstremisme berkekerasan. Dalam konteks pencegahan ekstremisme berkekerasan (*PVE-preventing violent extremism*), INFID memberikan sumbangan dalam upaya pencegahan melalui beberapa program berikut ini.

PREVENT: Mempromosikan Toleransi, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan.

PREVENT didesain untuk menawarkan solusi melalui (1) Pemberdayaan guru agama, orang muda, dan pemerintah daerah untuk mempromosikan toleransi, keberagaman, dan kebebasan beragama; (2) Penguatan pembelajaran dan kerja sama antar-organisasi di Indonesia dan institusi keagamaan di berbagai negara untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi. Implementasi program ini melalui dua cara. *Pertama* adalah memperluas basis sosial toleransi, kebhinekaan, dan kebebasan beragama melalui peningkatan kapasitas kalangan guru-guru agama Islam, pemimpin pemerintah daerah, dan kaum muda. *Kedua*, melanjutkan kampanye melalui media sosial untuk memperkuat dukungan warga kepada toleransi, kebhinekaan, dan kebebasan beragama.

Untuk tujuan pertama, INFID menyelenggarakan tiga kegiatan. **Pertama**, produksi pengetahuan tentang tren radikalisme dan perkembangan HAM yang telah menghasilkan: 1) Riset kualitatif “Efektivitas Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dan Peta Gerakan HTI”, 2) Penelitian kualitatif tentang Tren Radikalisme - Pemerintah, Perguruan Tinggi, Peraturan dan Undang-Undang Diskriminatif, dan 3) Survei warga “Sikap dan Pandangan Generasi Z dan Milenial di Indonesia terhadap Toleransi, Kebhinekaan dan Kebebasan Beragama”. Seperti biasa, untuk memastikan riset berkualitas, INFID menyelenggarakan proses *peer review* terhadap draf hasil laporan riset tersebut. Selanjutnya, ini dapat juga menjadi rujukan untuk agenda PVE (*prevention violent extremism*/pencegahan tindakan berkekerasan).

Kedua, penguatan dan pemberdayaan peran dan ruang untuk multipihak (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, kelompok minoritas). INFID menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru agama Islam dan meningkatkan moderasi beragama pada pelajaran agama Islam. Bekerja sama dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), INFID telah melatih 30 (tiga puluh) guru pendidikan agama Islam SMA/SMK di Provinsi Banten, 120 (seratus dua puluh) guru pendidikan agama Islam (GPAI) memperoleh pengetahuan dalam kegiatan *webinar* kelas inspiratif, 40 (empat puluh) guru PAI pilihan telah mengikuti kegiatan lanjutan untuk melakukan aksi di sekolahnya.

Intervensi pada guru semakin bertambah relevan pada era keterbukaan dan media sosial semakin berperan dalam menyebarkan informasi. Peningkatan literasi dapat mendorong guru PAI menjadi *role model* yang baik dalam mengunyah informasi secara kritis

dan sekaligus mempromosikan toleransi dan moderasi beragama bagi siswa mereka. Ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran yang muncul dari BNPT yang menyebutkan guru PAI juga berpotensi sebagai pihak yang menyebarkan paham radikal.

Intervensi pada pemerintah dilakukan dalam bentuk pelatihan HAM untuk pemerintah kabupaten/kota. INFID bersama Komnas HAM menginisiasi konsep kabupaten/kota HAM, dan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kabupaten/kota HAM. Salah satu tantangannya adalah minimnya kesadaran terkait pentingnya pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan, serta kapasitas aktor strategis dalam menerapkan kabupaten/kota menjadi lebih ramah pada HAM.

Pelatihan kabupaten/kota HAM ini diselenggarakan guna memberikan ruang belajar bagi aparatur pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendalami pemahaman dan urgensi pengimplementasiannya. Keberadaan kedua pemangku kepentingan ini menjadi penting mengingat kabupaten/kota HAM mensyaratkan adanya kerja kolaboratif antar-pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengimplementasiannya. Pelatihan diselenggarakan secara daring dan diikuti diikuti oleh 34 peserta (22 perempuan dan 8 laki-laki) perwakilan 10 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun pelatihan secara luring diikuti 28 perwakilan terdiri dari 14 orang dari pemerintah daerah (bappeda, bagian hukum, bakesbangpol) dan 14 perwakilan organisasi masyarakat sipil daerah (OMS) perwakilan 7 kabupaten/kota se-Karesidenan Surakarta.

Pada tahun 2022, kegiatan Festival Kota HAM kembali dilaksanakan dengan format konferensi HAM. Acara ini merupakan kegiatan rutin

tahunan yang merupakan kolaborasi antara Komnas HAM, INFID, dan KSP. Konferensi HAM 2022 di Jakarta dengan tema “Memperkokoh Keberagaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis”. Tema inklusi yang diangkat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran publik pada hak-hak para penyandang disabilitas. Harapannya adalah terwujudnya kesetaraan sekaligus keadilan bagi penyandang disabilitas serta kelompok marginal yang lain.

Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM atau disebut Konferensi HAM adalah forum untuk bersilaturahmi, bertukar pengetahuan ide, gagasan, dan berbagi pengalaman tentang praktik-praktik nyata yang telah berhasil diterapkan dalam membangun kabupaten/kota yang selaras dengan nilai-nilai HAM. Kegiatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait isu kabupaten/kota HAM dari dalam dan luar negeri.

Penguatan pada peran multipihak juga dikerjakan lewat intervensi Sekolah Demokrasi Online (SDO). Intervensi ini juga menasar pada pemerintah kabupaten/kota, OMS, ormas keagamaan, dan kelompok minoritas. Selama ini, gerakan-gerakan advokasi HAM dan demokrasi dalam rangka pencegahan ekstremisme berkekerasan yang didorong oleh OMS juga belum banyak terintegrasi dengan pemerintah. Dengan demikian, kegiatan Sekolah Demokrasi Online menjadi relevan untuk menumbuhkan pemahaman dan komitmen terhadap penguatan demokrasi untuk pencegahan esktrisme berkekerasan. SDO melibatkan pengambil kebijakan di daerah dan masyarakat sipil serta kelompok rentan.

SDO sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pada tahun 2022, INFID bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat telah

menyelenggarakan SDO yang melibatkan 32 peserta (17 perempuan dan 15 laki-laki) dari tujuh (7) kabupaten/kota di Jawa Barat. Kepesertaan SDO ini terdiri dari unsur pemerintah kabupaten/kota (kesbangpol kota/kabupaten, bappeda, dan biro hukum) sebanyak 18 orang, kelompok minoritas (Sunda Wiwitan) sebanyak empat orang, organisasi masyarakat sipil (OMS) sebanyak tiga orang, dan organisasi keagamaan tujuh orang.

Tidak hanya melalui pelatihan, membangun narasi toleran dan damai juga bagian dari upaya penguatan peran para aktor. Kelompok Islam ultra-konservatif terus menyebarkan pesan intoleransi dan ekstremisme di dunia maya. Salah satu kelompok yang rentan atas penyebaran pesan ini adalah anggota masyarakat yang mengalami proses kelahiran kembali dalam kehidupan beragama. INFID bekerja sama dengan empat mitra media, yaitu *NU Online*, *IBTimes*, *Arrahim*, dan *Islami.co* melakukan perlawanan sekaligus menawarkan narasi Islam damai di ruang maya. Bersama empat mitra media tersebut, INFID telah memproduksi dan publikasi konten berupa 16 video dakwah, 85 artikel, 36 infografis, 10 *podcast*, 10 video TikTok, dan tiga komik dengan total jangkauan mencapai 815.664 *views*, total 131.856 *reach/impression*.

Ketiga, penguatan dan pemberdayaan peran orang muda. Untuk kepentingan ini, bekerja sama dengan Jaringan Gusdurian, INFID yang telah memproduksi modul dan menyelenggarakan Youth Camp: “Muda Toleran” diselenggarakan di Kampoeng Media Digital Yogyakarta bertujuan menguatkan kapasitas pemimpin muda di Indonesia. Dari 597 orang muda yang mendaftar hanya 30 peserta terpilih dengan komposisi perempuan 15 orang, laki-laki 15 orang. Tiga puluh peserta tersebut berasal dari berbagai latar belakang,

yaitu 17 peserta berasal dari Jawa dan 13 berasal dari luar Pulau Jawa (Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, Riau, Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara).

Youth Camp “Muda Toleran” dilaksanakan dengan metode *interfaith dialogue* untuk mendobrak “sangkar budaya” (*cultural aviaries*) dengan menyediakan ruang bertemunya beragam budaya (*interculturalism*). Youth camp didesain dengan pendekatan orang muda dan keberagaman yang dilakukan dengan berbagai metode seperti “*river of live*”, kunjungan ke lapangan (pesantren waria, penghayat kepercayaan Sapta Darma, dan pura), *Unity in Diversity: Scenario Thinking*, *Social Presencing Theatre*, Mengenal U-Theory: Menganalisis Pola dan Tren, Struktur Penyebab, dan Mental Model, serta *Social presencing theater*. Lewat kegiatan ini orang muda didorong untuk memahami permasalahan intoleransi, radikalisme, dan kekerasan secara lebih komprehensif. Harapan selanjutnya adalah mereka nanti mampu mendesain aksi-aksi yang relevan dalam penguatan toleransi dan perdamaian.

Pemberdayaan orang muda juga dilakukan INFID dengan bekerja sama dengan *influencer* Kalis Mardi Asih lewat kelas menulis dengan tema #MencatatToleransiMerekamPerdamaian. Ada 15 pelajar SMA/SMK/MA, 13 di antara mereka adalah pelajar perempuan. Intervensi ini tidak lepas dari rekomendasi yang diperoleh dari guru PAI. Mereka mendorong kemunculan pelajar yang kritis dalam menyikapi keberagaman dan berperan sebagai agen perdamaian di sekolah. Kelas Menulis Kreatif untuk Perdamaian ini menjaring 15 peserta (13 perempuan dan dua laki-laki) yang merupakan remaja perempuan, dan laki-laki (15-18 tahun) dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Bondowoso, Pati, Jember, Pasuruan, Pati, Bogor, Semarang, Maros, Bantul, Pekanbaru, dan Banyumas. Dari proses

kelas ini, lima belas peserta telah berhasil menulis artikel berdasarkan pengalaman-pengalaman toleransi dan perdamaian. Selanjutnya, tulisan ini dipublikasi melalui *website* INFID dan jejaring media INFID.

Pelibatan secara bermakna orang muda juga didorong dalam proses pembangunan. INFID membuka ruang dialog dan bersuara bagi orang muda agar mereka lebih dilibatkan lagi dalam proses pembangunan di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan bertajuk “Diskusi Publik Kabupaten/Kota HAM: Tantangan Lokal dan Pelibatan Aktif Orang Muda dalam Prosesnya”. Ada tiga orang muda yang berbicara, yaitu Mei Osok (*Founder* Yayasan Keik Tsinagi dan *Co-Founder* Papua Muda Inspiratif), Eka Munfarida (alumni Youth Fellowship INFID dari Wonosobo), dan Dios Aristo Lumban Gaol (alumni Youth Fellowship INFID dari Medan). Opini mereka ditanggapi secara langsung oleh Sri Rahayu (Komnas HAM) dan Inayah Wahid (*Founder* Positive Movement). Diskusi ini dihadiri oleh 16 alumni (tiga perempuan dan 13 laki-laki) Youth Fellowship angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2021.

Dalam hal ini, INFID menyadari bahwa orang muda memiliki posisi strategis untuk terlibat dalam proses pembangunan di tingkat daerah, namun faktanya belum banyak ruang yang diisi oleh orang muda. Karena itu, INFID ingin mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan orang muda agar mereka bisa melakukan kerja-kerja ko-kreasi, pemenuhan HAM di daerah, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan seluas-luasnya melibatkan seluruh warga negara.

Untuk menjawab tujuan kedua dalam proyek ini, INFID menyelenggarakan kegiatan penguatan pembelajaran dan kerja sama antar-organisasi di Indonesia dan institusi keagamaan di berbagai

negara untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi.

Di tingkat global, *Islamfobia* masih muncul disebabkan promosi Islam damai belum menjadi narasi utama di tingkat global. Indonesia dianggap menjadi laboratorium yang berhasil dalam memadukan antara demokrasi dan Islam. Praktik baik yang terjadi di Indonesia ini perlu dikenalkan secara lebih luas, khususnya kepada negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia.

Pertama, INFID menyelenggarakan seminar internasional *online* yang bertajuk “Membangun Kerja Sama Internasional untuk Memperkuat Praktik Islam *Rahmatan Lil Alamin* di Dunia” yang dibuka secara langsung Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang hadir sekaligus sebagai *keynote speaker*. Seminar internasional ini melibatkan berbagai organisasi keagamaan Islam dari Pakistan, Malaysia, dan Tunisia. Acara ini juga didukung oleh Kedutaan Besar Indonesia di tiga negara tersebut. Dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seminar dibantu oleh Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Malaysia, PCINU Tunisia dan PCI Muhammadiyah di Tunisia. Pembicara lain adalah Kamaruddin Amin (Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), H.E. Muhsin Syihab (staf khusus Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Luar Negeri RI), K.H. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU), dan K.H. Syafiq A. Mughni (Ketua PP Muhammadiyah). Ada 487 orang hadir dalam rangkaian sesi seminar dari berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Tunisia. Seluruh rangkaian seminar media coverage yang diperoleh sebanyak 68 liputan di antaranya di platform media *online* resmi Wakil Presiden RI, *Kompas*, *CNN*, *NU Online*, *Antara*, *Suara.com*, *IBTimes*, *Arrahim.id*, *Islami.co* dan lain-lain.

Kedua, sebagai tindak lanjutnya, INFID bekerja sama dengan PBNU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) telah melakukan kunjungan persahabatan ke Pakistan dan Malaysia. Kedutaan Besar Indonesia di kedua negara tersebut berperan dalam memperlancar kunjungan persahabatan ini.

Kunjungan persahabatan di Pakistan diikuti empat delegasi perwakilan dari Aisyiyah (PP Muhammadiyah), Lembaga Perekonomian dan Bahtsul Masail (PBNU). Kunjungan ini menjadi ajang bagi Pakistan dan Indonesia untuk berbagi pandangan, pengalaman, inisiatif, dan kisah sukses dalam menjalankan moderasi beragama di tengah keberagaman.

Kegiatan kunjungan ke Malaysia yang diselenggarakan INFID bekerja sama dengan PP Muhammadiyah, PBNU, dan BPET Majelis Ulama Indonesia membawa manfaat dalam upaya meningkatkan toleransi, perdamaian, serta demokrasi di Indonesia dan Malaysia sebagai perwujudan dari Islam *rahmatan lil alamin*. Malaysia memiliki kerumitan yang lebih dibanding Indonesia dengan *cross-cutting affiliation* yang tinggi. Tiga etnis dominan di Malaysia, Melayu, Cina, dan India masing-masing membawa identitas kebudayaan dan agama yang berbeda.

Dalam kunjungan ini delegasi Indonesia diwakili masing-masing dua orang dari PP Muhammadiyah dan PBNU, seorang dari BPET MUI dan tiga orang dari INFID. Kunjungan ini juga melibatkan Pimpinan Cabang NU Malaysia dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan didukung KBRI Malaysia di Kuala Lumpur. Salah satu rekomendasi dari kunjungan ini adalah perlunya memperkuat jaringan intelektual Islam moderat di kawasan Asia Tenggara melalui *halaqah-halaqah* ulama Asia Tenggara secara rutin; mendorong Pemerintah Indonesia

dan Malaysia untuk memelopori kerja sama antar-ormas Islam *rahmatan lil alamin* dengan berbagai kegiatan seperti penguatan kapasitas dai, pertukaran dai, dan sebagainya; dan membentuk kelompok diskusi terbatas yang membicarakan isu-isu terkini dalam radikalisme ekstremisme dan terorisme dalam wacana global di Indonesia dan di Malaysia.

Sebagai kelanjutan dari seminar nasional dan kunjungan persahabatan ini, bersama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, INFID mengadakan lokakarya internasional bertajuk, "Penguatan Solidaritas dan Konsolidasi Gerakan Islam *Rahmatan Lil Alamin* di Negara Mayoritas Muslim." Kegiatan ini diikuti oleh dua puluh lima orang peserta, 12 peserta perempuan, dan 13 peserta laki-laki dengan berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari akademisi/universitas Islam, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, hingga para jurnalis, dari Indonesia, Pakistan, dan Malaysia. Terdapat tujuh poin rekomendasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti bersama-sama di kemudian hari oleh negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan di antaranya adalah program pertukaran siswa, guru, dan pengelola sekolah sebagai jembatan penghubung di antara lembaga-lembaga Islam di tiga negara muslim; pelatihan lintas agama bagi orang muda dengan fokus kehidupan di tengah keberagaman; dan pengarusutamaan etika Islam ke dalam sistem pendidikan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Selain di tingkat pencegahan, INFID juga melakukan intervensi dalam penanganan orang/kelompok orang yang terpapar paham radikalisme. Fokus utama diberikan pada deportan dan returni yang telah masuk kembali ke Indonesia.

Menurut data BNPT, ada 422 orang Indonesia yang masih tersebar di kamp-kamp pengungsian

di Suriah. Dari 422 orang ini, 78 orang adalah anak-anak berumur di bawah 10 tahun dan 344 anak di atas 10 tahun. Anak-anak yang sudah berumur di atas 10 tahun berpotensi memiliki pemahaman tentang ekstremisme yang cukup mapan. Adapun 422 orang Indonesia yang ada di kamp pengungsian di Suriah terdiri atas 222 laki-laki dan 190 perempuan; 272 orang Indonesia mantan anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ada di penjara-penjara di Suriah dan Irak.

TANGGUH: Penguatan Efektivitas Peran Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam Penanganan Deportasi dan Returni.

Proyek ini didesain untuk mencapai tujuan, *pertama*, membangun kapasitas pemangku kepentingan (BNPT, Kementerian Sosial, dan Densus 88) dalam menilai deportasi dan returni berdasarkan standar RATs (*risk assessment tools*) yang baru. *Kedua*, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menangani deportasi dan returni dengan pendelegasian tugas secara terstruktur dan berkelanjutan. *Ketiga*, mendorong dikeluarkannya peraturan atau pedoman dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk meningkatkan efektivitas, hasil, dan dampak program deradikalisasi bagi para deportasi dan returni.

INFID menginisiasi koordinasi dan kemitraan yang menghubungkan para pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir di tingkat lokal sampai nasional. INFID mengadakan berbagai forum konsolidasi penanganan deportasi dan returni di Indonesia yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pertemuan konsultatif dilakukan berkala dengan perwakilan kementerian/ lembaga seperti BNPT, BPET MUI, Densus 88; Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan

HAM; Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri.

Di tingkat lokal, INFID bersama dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur, mengadakan konsolidasi bersama para pemangku kepentingan yang terdiri dari OPD, ormas keagamaan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media. INFID kemudian melaksanakan forum nasional untuk mengkoordinasikan para pemangku kepentingan baik di Jawa Barat, Jawa Timur, dan nasional secara bersama dalam menyusun rencana penanganan deportasi dan returni. Forum ini penting untuk mengisi kesenjangan yang ada dan menghindari tumpang-tindih dalam implementasi intervensi.

INFID bersama Laboratorium Psikologi dan Politik Universitas Indonesia telah memproduksi modul “Intervensi Kesiapan Integrasi ke Masyarakat bagi Kelompok Terpapar”. Penyusunan modul melibatkan pemangku kepentingan utama, yaitu BNPT, Densus 88, dan Kementerian Sosial (Sentra Handayani dan Sentra Mulya Jaya) yang juga sekaligus menjadi sasaran pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani deportasi dan returni. Selain ketiga kementerian dan lembaga ini, pelatihan ini juga mengikutsertakan Satgas Foreign Terrorist Fighters (FTF). Penyusunan modul dimulai dengan proses *need assessment* di lapangan dan lokakarya desain penelitian. Penyusunan modul merupakan tindak lanjut dari penyusunan RATs: Kesiapan Integrasi Kelompok Terpapar Ekstremisme dan Radikalisme. RATs ini juga turut dilatihkan kembali pada tahun kedua ini kepada perwakilan BNPT, Densus 88, dan Kementerian Sosial untuk meninjau implementasi RATs.

Selain itu, INFID juga telah menyusun *background paper* yang diharapkan dapat

menjadi landasan bagi BNPT dalam menyusun naskah akademik bagi perban berjudul “Urgensi Payung Hukum dalam Penanganan Deportasi dan Returni”. Secara khusus OMS dan pemangku kepentingan di daerah memberikan masukan pada *background paper* ini terkait dengan mekanisme pembinaan deportasi dan returni dan juga pelibatan OMS dalam proses ini. BNPT telah mengundang INFID untuk terlibat dalam penyusunan Raperban BNPT mengenai deradikalisasi yang dapat menjadi landasan bagi penanganan deportasi dan returni.

Selain melakukan advokasi ke multipihak, INFID turut melakukan sejumlah kampanye kepada publik untuk mengenalkan mengenai deportasi dan returni yang masih sangat asing bagi umum. Beberapa kampanye yang dilakukan adalah membuat infografis dan *webinar* publik melalui media sosial INFID. Puncak kampanye publik dilakukan melalui sesi paralel pada Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah.

HARMONI: Penguatan Kapasitas dan Kemitraan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Ormas Keagamaan untuk Efektivitas dan Keberlanjutan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Lima kegiatan utama dalam proyek ini, yaitu 1) *kick off*; 2) revisi panduan teknis; 3) pertemuan forum multipihak; 4) pertemuan konsultatif; dan 5) penyusunan naskah kebijakan. Dalam implementasinya, INFID kembali bekerja sama dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur berfokus untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak.

Proyek ini membuahkan enam hasil. **Pertama**, anggota forum multipihak yang diinisiasi sejak tahun 2020 terus bertambah. Saat ini anggota forum mencapai 105 orang dan 64,8 persen adalah perempuan. Mereka berasal dari berbagai aktor mulai dari yayasan korban, forum anak, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi penyedia layanan, akademisi, dan media.

Kedua, keberadaan forum telah diakui oleh pemerintah daerah. Pengakuan tersebut berupa penerbitan dua payung hukum: 1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE) Tahun 2022-2024; 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/451/kpts/013/2022 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024.

Ketiga, pedoman teknis pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak terpapar paham radikal terorisme bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan yang telah direvisi dengan memperkuat perspektif gender dan perlindungan hak anak. Proses revisi dilakukan melalui diskusi intensif dengan para pakar dan juga melibatkan anggota forum *multistakeholder*. Pedoman teknis tersebut telah pula disampaikan kepada anggota *multistakeholder* dan pemerintah lokal, terutama bakesbangpol, dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Pedoman ini telah menjadi dokumen rujukan dari kertas kebijakan dan surat edaran.

Keempat, terselenggara delapan kali pertemuan forum multipihak: 2 pertemuan *online* dan 6 pertemuan *offline*. Pertemuan diselenggarakan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Adapun agenda pertemuan adalah memperkuat pengetahuan dan keterampilan serta advokasi anggota forum, mulai dari pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, ruang lingkup hukum daerah, dan materi yang berkaitan dengan penanganan dan pendampingan.

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam konteks relasi antara negara dan warga negara. Pelanggaran ini juga terjadi dalam konteks relasi antara korporasi dan buruh. Komnas HAM menerima 5.306 pengaduan dugaan pelanggaran HAM pada tahun 2022. Dari jumlah itu, terdapat 2.577 kasus dugaan pelanggaran HAM, yang 1.019 kasus dilanjutkan penanganannya. Tiga pihak yang paling banyak diadukan dan ditangani dengan mekanisme pemantauan dan penyelidikan adalah kepolisian (232 kasus), korporasi (75 kasus), dan pemerintah pusat (54 kasus).

Di tengah situasi saat pelanggaran HAM masih terjadi, ada kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah. Pemerintah meletakkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) sebagai prioritas setelah penerbitannya pada tahun 2011. Ini merupakan salah satu dokumen yang dapat menjadi salah satu pedoman yang bisa digunakan oleh negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM di sektor bisnis.

Dalam proses implementasi, pemerintah menunjuk Kemenko Perekonomian sebagai *national focal point* untuk Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2017. Lebih maju lagi, di tingkat regulasi, Komisi Nasional HAM

menerbitkan Perkomnas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM. Pasal 1 ayat (1) menyatakan RAN Bisnis dan HAM merupakan pedoman pencegahan, penanganan, penyelesaian, dan pemulihan pelanggaran HAM yang melibatkan entitas bisnis. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan buku *Panduan Bisnis dan HAM* pada tahun 2018.

Regulasi lain muncul secara kronologis. Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Isu bisnis dan HAM dimasukkan ke dalam RANHAM 2015-2019. Pada periode berikutnya, kembali muncul regulasi baru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025. Salah satu kriteria keberhasilan RANHAM adalah “Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha/bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan”.

INFID juga melakukan promosi HAM di dunia bisnis lewat proyek **GRAISEA2**: The Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investments in South-East Asia.

Proyek ini dilakukan bersama Oxfam di Indonesia dan memiliki mitra nasional dari golongan masyarakat sipil hingga perusahaan dan mitra regional organisasi masyarakat sipil yang mendorong penerapan bisnis dan HAM di negaranya masing-masing. Pada tahun 2022, GRAISEA fase kedua memasuki tahun keempat dari lima tahun rencana jangka panjangnya.

Dalam proyek GRAISEA2 terdapat tiga tujuan utama, yaitu 1) Produsen skala kecil, baik perempuan maupun laki-laki, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang

adil dari peluang ekonomi dalam rantai nilai pertanian dan pangan laut; 2) Dalam rantai nilai pertanian dan pangan laut, pelaku pasar memberikan peluang yang mengintegrasikan produsen kecil, mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim, dan 3) Kerangka kebijakan nasional dan regional mendorong model bisnis inklusif yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dalam konsorsium GRAISEA 2, INFID bertanggung jawab pada pencapaian tujuan ketiga. INFID mendorong implementasinya di Indonesia melalui komitmen pemerintah terhadap implementasi UNGPs. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, draf Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN BHAM) sudah final dan dalam proses menunggu persetujuan lewat keputusan presiden.

Program Penurunan Ketimpangan

World Economic Forum (WEF) telah merilis Global Gender Gap Report 2022. Laporan tersebut mengkaji ketimpangan gender di empat bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup.

Dalam laporan WEF tahun ini, secara umum Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 dan berada di peringkat ke-

92 dari 146 negara. Nilai tersebut meningkat sebanyak 0,009 dari 0,688 pada 2021. Tahun lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-101. Jika memerinci elemen pembentuk indeksnya, skor Indonesia terbebani oleh indeks pemberdayaan perempuan di bidang politik yang sangat rendah, yakni 0,169 atau di bawah rata-rata global. Kemudian di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi skor Indonesia sebesar 0,674 atau berada di kisaran rata-rata global. Adapun di bidang pendidikan serta kesehatan, Indonesia mendapat skor tinggi hingga 0,97, namun masih berada di kisaran rata-rata global.

Konteks, Peran, dan Kontribusi INFID

Secara umum, jumlah pengaduan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) menurun pada tahun 2022 dari tahun 2021, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag). Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah KBG. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99 persen atau 336.804 kasus.

Kasus perkawinan anak masih kerap terjadi setelah hampir tiga tahun pandemi COVID-19 berlangsung. Walau demikian, jumlahnya terpantau terus mengalami penurunan. Kasus perkawinan anak ini bisa dilihat dari data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Badan Peradilan Agama. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54 persen dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.

SETARA2030: Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia melalui Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS

Penundaan pengesahan RUU PKS selama sepuluh tahun menjadi alasan bagi INFID untuk melakukan advokasi berbasis bukti dan kampanye pada tahun 2022. Namun, di tengah perjalanan pelaksanaan program, pemerintah mengesahkan RUU ini dan sekaligus mengubah judulnya menjadi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam proses pelaksanaan program, INFID bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (KPI) dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).

Keberadaan UU TPKS ini merupakan kabar gembira. INFID bergerak maju dan menggeser fokus advokasi untuk mendesak pengambil kebijakan untuk menerbitkan aturan pelaksana/derivatif UU TPKS dan implementasinya di masyarakat. Secara keseluruhan, proyek ini telah memberikan kontribusi positif melalui advokasi berbasis bukti, mengumpulkan dukungan publik yang kuat terhadap pelaksanaan UU TPKS dan memperkuat kerja sama dan kemitraan antar-pemangku kepentingan.

Advokasi berbasis bukti tetap menjadi hal utama. Atas alasan inilah INFID melakukan dua pekerjaan. *Pertama*, kajian kebutuhan yang dilakukan melalui riset kualitatif berupa *need assessment* “Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Kedua*, kajian tentang persepsi masyarakat melalui riset kuantitatif “Studi Barometer Sosial Kesetaraan Gender: Persepsi Warga dan Tingkat Dukungan terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”.

Sosialisasi hasil kajian ke para pemangku kepentingan dan kampanye dilakukan melalui penyebaran artikel, infografis, dan video pendek. Selain itu, INFID juga mengadakan dialog publik berdasarkan hasil kajian di atas dengan tema “*Sharing* Persepsi tentang Konsep Dana Bantuan Korban.” Isu yang diangkat adalah konsep *victim trust fund*—sebuah mekanisme yang relatif baru dalam lanskap hukum Indonesia yang berfokus pada jaminan restitusi dan kompensasi bagi para korban. Acara ini diadakan sebagai bagian dari kampanye yang lebih besar bekerja sama dengan UN Women Indonesia, Westminster Foundation for Democracy (WFD), dan Caucus for Women in Parliamentary. Acara ini dilaksanakan di Kompleks DPR RI, Gedung Nusantara II, pada 29 November 2022 dalam rangka memperingati 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.

Hasil kajian yang diolah menjadi dua kertas kebijakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan Dana Perwalian Korban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dana Bantuan Korban. Kedua laporan ini mendapatkan tanggapan positif dari publik. Beberapa media nasional mengutip kajian tersebut.

Tanggapan positif lain muncul dari institusi lain. Open Government Indonesia (OGI) menjadikan kertas kebijakan tentang dana bantuan korban sebagai acuan evaluasi dan pengembangan rencana aksi baru untuk periode 2023-2024. Adapun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengadopsi kajian INFID sebagai acuan utama dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban.

Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2022 memberikan tinjauan global tentang kemajuan implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Menurut laporan tersebut, krisis yang saling terkait menempatkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dalam bahaya besar, bersama dengan kelangsungan hidup umat manusia sendiri. Laporan tersebut menyoroti tingkat keparahan dan besarnya tantangan yang ada di hadapan kita. Krisis, yang didominasi oleh COVID-19, perubahan iklim, dan konflik, menciptakan dampak lanjutan pada pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta perdamaian dan keamanan, dan memengaruhi semua TPB. Laporan tersebut memerinci pembalikan kemajuan bertahun-tahun dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, menyediakan layanan dasar, dan banyak lagi.

Menurut Sustainable Development Report 2022, saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16 persen dari seluruh TPB. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03 persen. Namun, sampai 2022 Indonesia masih mendapat label “merah” atau dinilai memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global. Pada tahun 2022 pencapaian TPB Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Adapun di

kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja Indonesia dalam pencapaian 17 TPB pada tahun 2030. Perbaikan terjadi pada tujuan pembangunan yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kemunduran terjadi pada tujuan pembangunan yang terkait dengan kemiskinan dan penurunan angka kelaparan. Tantangan ini bukanlah hal yang unik. Fenomena ini praktis terjadi di tingkat global.

Konteks, Peran, dan Kontribusi INFID

A4SD. Kajian Cepat Nasional 2022 Masyarakat Sipil Penyampaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. INFID bekerja sama dengan Action for Sustainable Development (A4SD) untuk menyiapkan laporan “*people’s scorecard*” pada tahun 2022. Laporan disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan *rapid assessment procedures* (RAP) yang berbasis *people’s scorecard toolkit* dikembangkan oleh Action for Sustainable Development. Ada sepuluh indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kolektif koalisi masyarakat sipil dan agregat dari implementasi TPB, yang berputar di sekitar tiga bidang utama, yaitu kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola yang inklusif.

Secara keseluruhan, kemajuan pencapaian 17 TPB di Indonesia menurut OMS masuk dalam kategori “*low-level*” dengan skor hanya 39. Ini lebih rendah dari hasil *people’s scorecard* tahun lalu. Pada saat itu, Indonesia masuk dalam kategori “sedang”. Indonesia mendapatkan skor tertinggi (45) untuk rencana aksi, strategi dan anggaran TPB, diikuti oleh tingkat nasional

implementasi (43) dan kerangka kebijakan (42). Namun, hasil ini juga memperlihatkan pekerjaan rumah bagi Indonesia. Pemantauan dan evaluasi memperoleh skor terendah 32. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana aksi dan proses pemantauan dan evaluasi.

Tujuan yang memperoleh nilai tertinggi adalah Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Tujuan 4 dianggap membaik karena peningkatan pendidikan anggaran dalam APBN/APBN, yaitu minimal 20 persen. Juga penurunan jumlah siswa putus sekolah. Sementara itu, Tujuan 5 meningkat seiring dengan diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sebaliknya, OMS memberikan nilai terendah untuk Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan). Mengenai Tujuan 7, ada kekurangan ambisi di bidang kebijakan transisi energi baru terbarukan (EBT). Alih-alih mendorong proses transisi, Indonesia justru berjalan mundur saat pemerintah menetapkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada batubara tampaknya signifikan. Ketergantungan ini dapat dilihat dari rencana Indonesia untuk menargetkan 64 persen penggunaan batubara sebagai pasokan pembangkit listrik pada tahun 2030.

Untuk Tujuan 10, ketimpangan dinilai dari melebarnya kesenjangan pendapatan di Indonesia. World Inequality Report (WIR) 2022 mencatat ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat tajam sejak tahun 1980-an. Kebijakan deregulasi paket di sektor ekonomi, keuangan, dan perbankan belum menunjukkan kontribusinya pada penurunan ketimpangan

yang signifikan.

Bukan hanya pembangunan, isu keberlanjutan juga terjadi pada OMS. Sebagian persoalan terletak pada relasi antara pemerintah dan OMS. Pemerintah tidak selalu seragam dalam memandang keberadaan OMS. Namun, secara umum, OMS yang berperan menjadi *watchdog* merupakan OMS yang paling rentan dalam menghadapi represi pemerintah. Represi atas kebebasan berekspresi di dunia maya terus terjadi. Pengalaman ini dialami terutama OMS yang bergerak di bidang HAM, demokrasi, dan anti-korupsi. Berdasarkan data Safenet, pada tahun 2022 terjadi insiden keamanan digital 302 kali. Insiden keamanan ini meningkat 54 persen dibandingkan tahun 2021, yakni 193 kejadian. Lima puluh jurnalis dan 55 OMS mengalami serangan digital ini.

Namun, di tengah represi ini, pemerintah juga memandang OMS sebagai mitra di bidang pembangunan yang lain. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa memberikan ruang kepada OMS untuk masuk sebagai penyedia barang dan jasa. Payung hukum untuk membuka ruang dan mengakomodasi peran masyarakat sipil dalam pembangunan. Pada saat pandemi COVID-19 Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran nomor 440/5538/SJ memberikan ruang bagi OMS untuk mengakses dana guna percepatan penanganan pandemi.

Kemitraan antara pemerintah dan OMS bukan hal yang baru di banyak negara. Bagi negara-negara yang menerapkan prinsip demokrasi, keberadaan OMS merupakan kunci. Penghargaan ini diwujudkan dalam dukungan dana publik kepada mereka. OMS di negara-negara maju inilah yang menjadi mitra kerja sama bagi OMS di negara lain, termasuk Indonesia. Ini banyak terjadi pada OMS yang

terlibat dalam kerangka kerja sama bantuan pembangunan internasional.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 telah menyebabkan banyak negara melakukan realokasi anggaran. Perlindungan kesehatan warga negara dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas. Salah satu dampak yang terjadi adalah pengurangan yang signifikan pada dana publik. Pengurangan ini secara langsung memengaruhi pada kinerja OMS di negara maju, dan selanjutnya hal yang sama dialami OMS di negara lain yang menjadi mitra kerja mereka.

Pandemi COVID-19 bukan satu-satunya faktor. Status Indonesia yang naik menjadi negara berpendapatan menengah tinggi adalah faktor lain yang menyebabkan menurunnya arus dana publik dari negara maju ke Indonesia. Negara maju tidak lagi memandang Indonesia menjadi negara prioritas bagi kerja sama pembangunan internasional. Muaranya adalah keberlanjutan bagi OMS di Indonesia yang selama ini menggantungkan nasib mereka dari dana publik ini menjadi pertanyaan besar.

Ini merupakan salah satu faktor yang bisa menjelaskan penurunan indeks keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dalam CSO Sustainability Index Explorer periode 2014-2019 yang dipublikasikan FHI 360, Indonesia mengalami penurunan *financial viability* sejak tahun 2019. Situasi diperburuk pada saat pandemi COVID-19. Negara donor mengalihkan sebagian besar perhatian dan sumber daya, termasuk sumber daya finansial, untuk menangani masalah domestik mereka.

Berdasarkan laporan survei pada tahun 2020, INFID dan Tempo Institute menemukan 72 persen dari 157 OMS menderita secara finansial, baik karena penurunan jumlah dana maupun

bahkan pembatalan kerja sama, sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Bahkan, 23 persen di antara mereka tidak dapat beroperasi.

Pokja Organisasi Masyarakat Sipil. Pokja Pendanaan LSM dari dana publik terbentuk sejak Januari 2021. Selain INFID, OMS lain yang terlibat adalah KAPAL Perempuan, Konsil LSM, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Prakarsa, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Penabulu Foundation, dan REMDEC. Pokja dibentuk sebagai tindak lanjut atas undangan pertemuan secara berturut-turut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden. Pada dua pertemuan tersebut, Bappenas dan KSP berkomitmen mendukung kelahiran kebijakan pendanaan negara untuk organisasi masyarakat sipil. Ini tidak terlepas dari mandat yang sudah tertulis dalam RPJMN 2020-2024 yang menyatakan peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu strategi untuk memperkuat proses konsolidasi demokrasi.

Pokja mengajukan proposal kepada pemerintah tentang pembentukan dana abadi (*endowment fund*) dari negara dan dikombinasikan dengan dana lain yang berasal dari hibah atau bantuan pembangunan. Dana abadi ditujukan membantu pendanaan LSM yang bergerak di bidang pemajuan demokrasi, HAM, persatuan dan kesatuan, partisipasi dan penguatan LSM, keberlanjutan LSM dan tujuan sosialnya. Pengelolaannya diserahkan kepada badan layanan umum (BLU) di bawah tanggung jawab menteri dengan peraturan presiden sebagai payung hukumnya. Struktur organisasi BLU terdiri dari dewan pengarah, dewan pengawas, dan lembaga pelaksana dana abadi OMS.

Pokja menyusun *background paper* dan menjadikannya sebagai bahan rujukan

bagi pembentukan dana abadi ini dan implementasinya. Ada empat topik yang diangkat, yaitu (i) Urgensi Pendanaan OMS, Peluang dan Tantangan: Pengalaman Indonesia dan Internasional dalam Pendanaan untuk Mendukung OMS; (ii) Landasan Hukum, Aspek Struktur Kelembagaan, dan Tata Kelola Inisiatif Pendanaan OMS; (iii) Jenis OMS yang Didanai dan Skema dan Pelaksanaan Pendanaan OMS, dan (iv) Tingkat Dukungan OMS Indonesia terhadap Urgensi Pendanaan dari Pemerintah.

Didukung oleh empat peneliti utama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan demokrasi, Pokja juga telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden dan Naskah Keterangan Pentingnya Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Memperkuat Peran dalam Pembangunan dan Demokratisasi Indonesia untuk dipertimbangkan pemerintah dalam penyusunan kerangka regulasi pendanaan OMS. Kedua naskah telah menyelesaikan proses *peer review* yang melibatkan tiga ahli dari Kementerian Keuangan dan dua perwakilan masyarakat sipil yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan organisasi masyarakat sipil. Bappenas dan KSP terlibat dalam proses ini.

Konsultasi reguler dengan Bappenas dan KSP terus dilakukan untuk menyampaikan dan meminta masukan bagi dokumen draf perpres dan *background paper* serta perumusan strategi ke depan.

BUILD: Penguatan Kelembagaan. INFID akan menjadi organisasi advokasi berbasis bukti untuk memajukan perubahan kebijakan dan kelembagaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Ada empat aspek yang dikerjakan dalam kemitraan ini untuk memperkuat INFID. **Pertama**, *branding* dan komunikasi, termasuk melalui

media sosial, dikembangkan dengan baik dan menjangkau komunitas yang lebih luas untuk mengamankan dukungan mereka terhadap perubahan kebijakan. Ada kesenjangan dalam kerja INFID terkait dengan komunikasi advokasi kebijakan. INFID tidak mampu mencurahkan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kesadaran publik dan melibatkan kaum muda dalam perdebatan tentang reformasi kebijakan. INFID juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang orang muda sehingga belum memiliki strategi untuk mendorong keterlibatan mereka.

Pada periode pertama kemitraan dengan BUILD, INFID berfokus pada *assessment* kebutuhan komunikasi, membangun studio *podcast* serta mekanisme alur komunikasi dengan melibatkan konsultan komunikasi. Hal ini meningkatkan *engagement* INFID di sosial media secara signifikan, contohnya *reach* dan *engagement* publik di Instagram INFID berada di angka 10.000 secara konsisten setiap bulan.

Kinerja ini jauh meningkat dibanding dengan tahun 2021 yang ditandai dengan *reach* berada di angka 2.000. *Followers* di Instagram sendiri memiliki tambahan 2.000 akun dan berada di atas Oxfam Indonesia dan TIFA Foundation kendati Instagram yang dikelola INFID tanpa fitur promosi dan upaya tambahan lain yang lebih sistematis dan terencana dengan baik. Bukti di Instagram membuat *content* INFID di sosial media kemudian banyak di-*repost*, *retweet* ataupun *share* ke akun pengguna yang lain. Instagram sendiri merupakan media sosial terpopuler nomor dua bagi anak muda setelah Youtube. Pemetaan tipologi konten yang menarik bagi anak muda serta penggunaan fitur promo/*advertising* diharapkan pada periode selanjutnya dapat mendongkrak kinerja INFID di media sosial.

Kedua, INFID memiliki strategi rekrutmen, peningkatan kapasitas, dan penciptaan budaya belajar untuk bekerja secara profesional untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, dan berkontribusi dalam diskusi kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti SDGs 2030.

Ketiga, INFID berpijak pada prioritas anggotanya dan melayani mitranya di berbagai bidang dan wilayah Indonesia. Terkait pelibatan anggota dalam program, hal yang telah dilakukan yaitu 1) riset persepsi dan *assessment* kepada anggota dan mitra INFID (mitra pembangunan, media, universitas, dan pemerintah); 2) melakukan sidang umum anggota untuk memilih badan pengurus dan pengawas baru; 3) terlibat dalam lokasi proyek program BUILD TPB sebagai mitra OMS daerah.

Hasil positif dari kedua riset misalnya; 1) INFID telah transparan dan akuntabel sehingga diterima banyak organisasi lain termasuk pemerintah; 2) INFID mendapat pengakuan atas kerja-kerja yang dilakukan dalam penguatan demokrasi, implementasi TPB, isu disabilitas dan inklusivitas, dan narasi keberagaman; 3) Pada beberapa anggota, INFID dianggap berkontribusi memberikan peningkatan kapasitas desain program dan pendanaan; 4) Regenerasi staf (orang muda INFID) merupakan pembelajar dan hal regenerasi patut diapresiasi.

Masukan yang perlu diperhatikan untuk INFID misalnya 1) INFID harus menjaga keseimbangan antara mitra dan kontrol pemerintah karena bukan lembaga layanan dan perlu mengurangi porsi kemitraan dengan pemerintah; 2) INFID diharapkan dapat memfasilitasi CSO yang mengalami kesulitan pendanaan, termasuk mengkonsolidasikan jaringan OMS nasional.

Keempat, INFID memiliki ketahanan finansial

yang kuat berdasarkan tiga sumber, yaitu dana yang dibatasi (*restricted fund*) dari donor, pendapatan yang diperoleh (*earned income*) dari unit bisnis, dan peningkatan cadangan. Peluang lain untuk INFID adalah memonetisasi produk penelitian dan analisis kebijakan dan meminta pemulihan biaya yang sebenarnya (*true cost recovery*) untuk memperkuat sumber daya keuangan.

INFID telah menjajaki konsultasi potensi unit usaha ke beberapa lembaga. Atma Jaya Inkubator Bisnis (AJIB) dari Universitas Atma Jaya Jakarta dalam proses MoU untuk menjadi konsultan pendamping *earned income* dalam satu tahun ke depan.

Di bawah Kepresidenan Indonesia, KTT G20 tahun 2023 mengangkat tema besar, yaitu “Recover Together, Stronger Together”. Hal itu tak lepas dari refleksi pandemi COVID-19 yang menghambat proses pembangunan secara global. Kondisi perekonomian di beberapa negara dapat dengan cepat pulih mendekati normal, sementara beberapa negara lain kesulitan untuk melepaskan diri dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Namun, di tengah ketimpangan global tersebut, tampaknya negara kaya, termasuk negara anggota G20, tidak cukup berperan untuk membantu negara berkembang dan miskin untuk pulih. Vaksin yang telah dilihat sebagai pengubah permainan (*game changer*) bagi setiap negara di dunia untuk pulih mestinya telah didistribusikan secara merata. Terlepas dari kontroversi pro dan kontra di negara maju atas vaksinasi ini, persentase penerima vaksin masih jauh lebih tinggi terutama dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah. Hasilnya adalah biaya kesehatan, ekonomi dan sosial yang lebih tinggi yang harus dibayar oleh

negara-negara berkembang dan miskin.

Pemulihan dari pandemi COVID-19 bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi setiap negara di dunia, terutama negara berkembang dan miskin. Tantangan lain adalah pencapaian target SDGs pada tahun 2030 yang tinggal tujuh tahun lagi. Pandemi COVID-19 merupakan kemunduran bagi pembangunan berkelanjutan di mana pun. Untuk pertama kalinya sejak penerapan SDGs pada tahun 2015, skor Indeks TPB rata-rata global untuk tahun 2020 telah menurun dari tahun sebelumnya: penurunan yang sebagian besar didorong oleh peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran setelah merebaknya pandemi COVID-19. Pandemi yang mengakibatkan menurunnya kinerja lintas sektor telah meningkatkan biaya pencapaian target. Ini telah menjadi tantangan global terbesar. Sebelum pandemi, kerja sama internasional yang dibutuhkan negara berkembang dan miskin tidak terealisasi dengan baik. Pada masa pandemi kesadaran ini tentu saja semakin memburuk.

Ketimpangan dalam akses pada layanan kesehatan hanyalah salah satu. Ketimpangan di tingkat global juga terjadi di bidang sosial, ekonomi, gender, dan lingkungan. Semua memperlihatkan pembangunan di tingkat global tidak bersifat inklusif.

C20: Memperkuat suara dan keterlibatan masyarakat sipil di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022 melalui pelaksanaan KTT C20 yang inklusif dan responsif. Tujuan yang hendak dicapai adalah mendorong kebijakan dan agenda global Presidensi G20 Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan responsif melalui rekomendasi masyarakat sipil yang dibagikan di KTT C20.

Berdasarkan Deklarasi Bali, para pemimpin

G20 menyadari adanya desakan untuk mengakomodasi dan memprioritaskan mereka yang termasuk dalam kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan antara negara maju dan negara berkembang. Ini juga berlaku untuk negara-negara anggota non-G20 yang tergabung dalam Small Island Developing State (SIDS) di Pasifik dan Karibia dan Negara-Negara Terbelakang (Less Developed Country).

Seluruh Kelompok Kerja C20, Kelompok Kerja Keuangan G20, dan Sherpa telah melakukan beberapa diskusi kebijakan baik secara daring maupun luring, termasuk juga dialog kebijakan. Para Sherpa G20 hadir dalam KTT C20 dan memberikan apresiasinya terhadap *policy pack* dan *communique* yang dihasilkan.

C20 Indonesia telah menghubungkan 517 CSO secara nasional dan internasional. INFID yang berperan menjadi Ketua C20 sukses menggelar C20 Summit dalam format *hybrid*, di mana 105 orang hadir secara daring dan 412 orang hadir secara luring.

Untuk mengkomunikasikan posisinya kepada publik, C20 Indonesia telah melakukan serangkaian media *briefing*, konferensi pers, termasuk konferensi pers bersama dengan Sherpa G20. Sedikitnya 81 media, sebagian besar media nasional, meliput kegiatan tersebut.

Pandemi COVID-19 juga memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Beban tambahan bagi puskesmas untuk menangani COVID-19 menyebabkan kinerja pelayanan kesehatan lain bukan merupakan prioritas utama lagi. Situasi ini juga terjadi pada rumah sakit. Lebih-lebih, penurunan kualitas pelayanan semakin diderita oleh kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pandemi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi yang didukung teknologi digital, mulai dari *telemedicine* untuk pasien isolasi mandiri hingga platform layanan kesehatan SatuSehat. Teknologi digital juga diharapkan bisa mencegah penyakit-penyakit katastropik yang membutuhkan perawatan medis lama dan berbiaya tinggi. Indonesia Health Services (IHS) ini akan mengintegrasikan data rekam medis pasien di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Deteksi dini, penerapan pola makan, dan perilaku hidup sehat bisa didorong dengan bantuan teknologi digital.

Perkembangan pemerintahan terbuka (*open government*) di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan sejak tahun-tahun terakhir. *Pertama*, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan data, termasuk pembentukan Portal Data Terbuka Indonesia (data.go.id) yang menyediakan akses terhadap berbagai data pemerintah. *Kedua*, Pemerintah Indonesia semakin mengakui pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Beberapa mekanisme partisipasi publik telah diperkenalkan, seperti penyelenggaraan konsultasi publik, diskusi publik, dan forum-forum partisipatif lain. *Ketiga*, transparansi anggaran menjadi fokus penting dalam pemerintahan terbuka di Indonesia. Pemerintah telah mengadopsi sistem anggaran terbuka (*open budgeting*) yang memungkinkan publik untuk mengakses dan memantau penggunaan anggaran publik secara lebih terbuka. *Keempat*, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah ada sejak 2008 dan memberikan akses yang lebih besar kepada publik untuk memperoleh informasi dari pemerintah.

Kendati ada perkembangan positif dalam *open government* di Indonesia, masih ada tantangan

yang perlu diatasi, seperti peningkatan kualitas data terbuka, penggunaan teknologi yang lebih luas dalam proses partisipatif, dan pemenuhan permintaan informasi publik yang lebih baik.

Open Government Indonesia (OGI)

merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong pemerintah yang terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat. Selain itu, OGI merupakan upaya keterbukaan pemerintah melalui proses ko-kreasi yang mengkolaborasikan elemen pemerintah dan elemen non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan.

INFID berpartisipasi dan mendorong Komitmen 14 RAN OGI VI 2020-2022 tentang Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data. Perubahan struktural di internal Kementerian Kesehatan mengakibatkan implementasi Komitmen 14 RAN OGI VI 2020-2022 tentang Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data mengalami kendala. INFID seperti memulai pekerjaan dari awal kembali pada periode akhir Komitmen 14 ini. Untuk mengatasi kendala ini, INFID berkoordinasi dengan Sekretariat OGI Bappenas. Dari beberapa diskusi muncul beberapa opsi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan, khususnya dalam berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

INFID akhirnya dapat berkoordinasi lagi dengan Kementerian Kesehatan. Namun, dari diskusi dan koordinasi yang terjadi, kementerian ini melakukan perubahan ukuran ketercapaian di semester akhir komitmen ini. Selain itu, pelibatan INFID dalam pengembangan platform ataupun kerja kolaborasi lain masih sangat minim. Kendala terakhir ini mempersempit ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil yang

menjadi landasan bagi Open Government Indonesia.

Menuju akhir selesainya Komitmen 14, INFID melakukan proses ko-kreasi dengan Kementerian Kesehatan melalui pembuatan survei terbuka persepsi organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan M-KIA, aplikasi untuk pemantauan kesehatan ibu dan anak, dan menjadikan laporan survei sebagai masukan bagi Kementerian Kesehatan. Survei tersebut kemudian diolah oleh INFID dan diberikan sebagai masukan kepada Kementerian Kesehatan sebagai substansi pengembangan M-KIA dan platform kesehatan yang lain.

Pelayanan kesehatan telah mengalami tantangan berat pada era pandemi COVID-19. Sistem kesehatan mengalami pukulan keras. Pandemi COVID-19 telah memberikan beban yang berat pada sistem kesehatan. Lonjakan kasus COVID-19 memengaruhi kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang lain. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan waktu tunggu, keterbatasan tempat tidur, dan akses terbatas pada perawatan kesehatan bagi pasien non-COVID-19 seiring dengan penyesuaian fokus pelayanan pada penanganan pasien COVID-19, termasuk pemeriksaan, perawatan, dan vaksinasi.

Pelayanan Kesehatan pada Era Pandemi COVID-19. Pelayanan kesehatan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dapat berjalan optimal jika: 1) pemerintah bersedia mengevaluasi tata kelola dan akuntabilitas pelayanan kesehatan; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan pencegahan penyebaran COVID-19, dan 3) meningkatkan pelaksanaan kinerja jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Untuk mencapai hal tersebut, INFID berupaya melakukan empat strategi: 1) Kerja politik. INFID melakukan penelitian dan lobi dengan para pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah. Tidak hanya pemerintah, tetapi sasaran lobi juga parlemen; 2) Pekerjaan teknis. INFID mengumpulkan bukti-bukti baru berdasarkan data dan informasi dari masyarakat setempat, pemangku kepentingan kesehatan, dan BPJS kesehatan; 3) Kerja jaringan. Membangun kapasitas OMS untuk dapat berpartisipasi dan melakukan advokasi, serta melibatkan pemangku kepentingan kesehatan dan lainnya seperti asosiasi tenaga kesehatan, akademisi, jurnalis, dan lain-lain; 4) Mempromosikan dari bawah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19.

Kegiatan yang telah dilakukan dapat dibagi menjadi tiga: a) persiapan penelitian dengan bukti baru (survei dan penelitian warga); b) advokasi melalui kolaborasi pemangku kepentingan; c) memantau dan meningkatkan kesadaran publik. Riset ini bertujuan sebagai kegiatan advokasi berbasis bukti dengan menilai ketersediaan, kecukupan, dan kualitas pelayanan kesehatan serta respons terhadap pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian (seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain), Gugus Tugas COVID-19, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.

Tujuan dari otonomi khusus bagi Papua adalah memberikan pengaturan dan kebijakan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Salah satu tujuan khususnya adalah peningkatan akses dan pelayanan publik. Otonomi khusus bertujuan meningkatkan akses masyarakat

Papua terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui pengelolaan otonom, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang ada di Papua dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Transfer dana yang besar dari pemerintah pusat tidak serta-merta dapat memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Papua. Bahkan, secara umum Papua terus menempati peringkat terendah di antara provinsi-provinsi di Indonesia untuk semua indikator pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 untuk Provinsi Papua 60,62 dan Papua Barat 65,26. Meski capaian kedua provinsi naik secara gradual, kedua skor tersebut masih merupakan yang terburuk di seluruh Indonesia. Ini merupakan refleksi bahwa negara absen dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Papua di pesisir, dengan kondisi yang bahkan lebih buruk lagi di pegunungan. Padahal, selain kesehatan, pendidikan diyakini sebagai alat untuk membantu masyarakat naik kelas secara ekonomi. Tata kelola pemerintahan lokal yang belum kuat dan kurangnya partisipasi warga, khususnya orang asli Papua (OAP) dalam tata kelola pemerintahan daerah, tetap menjadi tantangan.

KOLABORASI. Bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Kitong Bisa Foundation, INFID melakukan intervensi untuk memastikan kebijakan berpihak pada orang asli Papua. Proyek ini diharapkan dapat membantu Papua dan Papua Barat menyerap dana otonomi khusus (otsus) dengan lebih baik dengan cara memberikan pelatihan bagi pejabat di wilayah Papua, pemerintah pusat, dan mahasiswa di bidang-bidang seperti perencanaan, penganggaran, dan pemantauan agar dapat

mengelola dana secara efisien serta merespons kebutuhan masyarakat Papua khususnya melalui pelayanan publik dasar yang akuntabel dan responsif.

Kolaborasi memiliki empat hasil antara. Hasil Antara 1 – Pemerintah daerah yang didukung kapasitas perencanaan dan penganggaran. Hasil Antara 2 - Menetapkan pembinaan dan kurikulum tentang perencanaan dan penganggaran untuk pejabat Papua. Hasil Antara 3 - Membantu pemerintah daerah dalam pembangunan proses perencanaan yang melibatkan orang asli Papua (OAP)/ *local champions*. Hasil Antara 4 - Dukungan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk perencana pusat/daerah dan mahasiswa Papua untuk akselerasi pembangunan di Papua.

Secara khusus, INFID akan bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua untuk mendirikan SDGs Centre/Forum sebagai pusat pembelajaran bagi perencana dan penyusun kebijakan di Papua. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan INFID semenjak kolaborasi dikerjakan mulai pertengahan tahun 2022. Seperti biasa, INFID memulai dengan *assessment* kebutuhan sebelum beranjak pada intervensi peningkatan kapasitas bagi perencana daerah.



BAB III

INFID DALAM MEDIA

INFID memanfaatkan keberadaan media, termasuk media sosial, untuk memengaruhi upaya pemajuan pembangunan, demokrasi, dan HAM.

Pertama, INFID menggunakan media untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan INFID, hasil produk pengetahuan (misalnya, laporan riset dan infografis). Ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu yang dikerjakan INFID. Selain itu, INFID juga menggunakan media untuk mengadakan pelatihan, diskusi, dan *webinar* sebagai bagian dari peningkatan kapasitas publik dalam memahami dan mengatasi tantangan pembangunan, demokrasi, dan HAM.

Kedua, INFID menggunakan media untuk memperluas jaringan dan membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lain yang memiliki tujuan serupa. Melalui media sosial, INFID dapat terhubung dengan

pemangku kepentingan dan para pakar di bidang pembangunan, demokrasi, dan HAM. Pertukaran informasi, pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman terjadi lewat mekanisme ini.

Ketiga, INFID menggunakan media sebagai bagian dari kerja advokasi dan kampanye untuk memperjuangkan perbaikan kualitas pembangunan, penguatan demokrasi, dan penegakan HAM. Dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, dan *online*, INFID menyampaikan pesan tentang perubahan kebijakan dan praktik melalui publikasi opini, wawancara media, dan kolaborasi dengan jurnalis. Orang muda menjadi perhatian utama bagi INFID pada beberapa tahun terakhir ini. Atas alasan ini pula, INFID juga memanfaatkan media sosial, yang populer di kalangan orang muda, untuk mendorong mereka untuk terlibat lebih bermakna di ruang publik di bidang pembangunan, demokrasi, dan HAM.



Keempat, INFID menggunakan media sebagai alat pemantauan dan pelaporan terkait isu pembangunan, demokrasi, dan HAM. INFID menggunakan media untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM, kinerja pelayanan publik, pasang-surut demokrasi, dan masalah lain terkait dengan pembangunan. INFID berharap kerja ini dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan dan praktik.

INFID telah melakukan investasi yang lebih serius dan memastikan ketersediaan sumber daya dan kompetensi yang andal untuk melakukan kerja media yang efektif. Pada era digital ini, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan strategi komunikasi menjadi landasan bagi INFID untuk mencapai perubahan kebijakan dan praktik sebagai dampak dari kerja yang dilakukan.

Media massa di tingkat lokal dan nasional memiliki perhatian pada INFID. Pada tahun 2022 saja, jumlah liputan dari media massa untuk program

HAM dan Demokrasi, TPB, dan Pengurangan Ketimpangan secara berturut-turut sejumlah 218, 68, dan 15 liputan. Secara keseluruhan ada 301 liputan media massa atas kegiatan INFID. Jumlah liputan ini tidak bisa dilepaskan sebagian dari upaya INFID menyelenggarakan media *briefing* dan mengirimkan siaran pers terkait dengan kegiatan INFID atau tanggapan cepat INFID atas isu yang tengah berkembang.

Media sosial juga menjadi perhatian bagi INFID di tengah realitas semakin banyak orang muda menempatkan media sosial sebagai sumber berita dan menempatkan *influencer* dan selebriti sebagai pembawa berita yang lebih dikenal bagi mereka dibandingkan jurnalis. Pada tahun 2022 INFID telah menyebarkan informasi dan pesan kampanye melalui media sosial yang populer di kalangan orang muda. Akun INFID di Instagram memiliki pengikut 6.120 orang; Facebook 7.098; Twitter 4.312 orang; dan YouTube 1.420 orang.



BAB IV

INFID DI TENGAH MASYARAKAT

Aktivitas yang dikerjakan sepanjang tahun 2022, dan sebelumnya, telah memberikan beberapa dampak. **Pertama**, di tingkat kebijakan, misalnya, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/451/kpts/013/2022 tidak bisa dilepaskan kaitannya dari peran INFID dan Fatayat NU Jawa Timur. Regulasi ini mengatur pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024. Hal serupa terjadi di Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2022 tentang RAD Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 muncul atas kerja yang dilakukan oleh INFID bersama Institut Perempuan.

Kedua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjadikan kertas kebijakan INFID terkait dengan dana bantuan korban (DBK) sebagai acuan utama dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perwalian Korban. Peraturan pemerintah ini berperan secara instrumental untuk memastikan UU TPKS dapat dijalankan secara semestinya. Open Government Indonesia (OGI) memiliki pandangan yang sama dan menjadikan kertas kebijakan tentang dana perwalian korban sebagai acuan evaluasi dan pengembangan rencana aksi baru untuk periode 2023-2024.

Ketiga, di tingkat yang lebih praktis, kerja INFID di bidang TPB juga mendapat pengakuan dari kelompok non-pemerintah (kampus, OMS, dan sektor swasta). Pengakuan ini berbentuk undangan bagi INFID untuk menjadi narasumber dalam kegiatan lokakarya dan kuliah tentang TPB di perguruan tinggi serta audiensi/konsultasi yang diajukan sektor swasta. Kuliah khusus TPB dilakukan daring seperti di Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung) dan Universitas Bakrie (Jakarta). Salah satu pelaku bisnis yang melakukan konsultasi adalah Zurich Insurance.

Keempat, Riset INFID mengenai tren komunikasi dan tata kelola TPB, serta riset penilaian TPB oleh masyarakat sipil, telah menjadi rujukan revisi regulasi TPB, yaitu Perpres TPB No. 111 Tahun 2022. Riset panduan dan praktik TPB desa yang berperspektif gender juga diterima oleh Kementerian Desa dan menjadi tolok ukur pelaksanaan TPB desa di Indonesia. Di tingkat internasional, INFID menjadi perwakilan dari Indonesia dan Asia Tenggara bersama koalisi TPB global untuk memberikan laporan kemajuan TPB versi masyarakat sipil. Laporan ini disampaikan pada *side event* dari United Nations General Assembly 2022. Laporan kemajuan ini

Di tingkat internasional, INFID menjadi perwakilan dari Indonesia dan Asia Tenggara bersama koalisi TPB global untuk memberikan laporan kemajuan TPB versi masyarakat sipil.

direncanakan juga akan disampaikan pada UN ESCAP 2023 dan UN HLPF 2023.

Kelima, dampak lain di tingkat internasional juga dapat ditemui sebagai bagian dari promosi moderasi beragama. Upaya INFID dalam membangun partisipasi internasional memantik inisiatif-inisiatif baru lain, antara lain: 1) Kedutaan Besar Indonesia, Yordania, Malaysia, Arab Saudi, Tunisia, dan Turki di Islamabad bekerja sama dengan National Commission on the Status of Women menyelenggarakan International Workshop on “Muslim Women Pioneers”; 2) KBRI di Pakistan menggandeng INFID untuk melaksanakan kunjungan jurnalis asal Pakistan dalam rangka mempromosikan moderasi Islam Indonesia di Pakistan. Kunjungan dua orang jurnalis Pakistan dalam rangka memotret moderasi Islam dan reformasi sistem pendidikan Islam di Indonesia melalui kunjungan ke beberapa madrasah/pondok pesantren di Indonesia. Jurnalis asal Pakistan tersebut berkesempatan melihat kegiatan santri melalui kegiatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), ekstrakurikuler, penerapan moderasi Islam, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Kunjungan juga dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata di sekitar madrasah/pondok pesantren.

DAFTAR KEGIATAN TAHUN 2022

HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
TANGGUH		
1	<i>Consultative Meeting #1</i> "Penguatan Efektivitas Peran Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penanganan Deportasi dan Returni"	23 Maret 2022
2	Pelatihan <i>risk assessment tools</i> untuk BNPT	30-31 Maret 2022
3	<i>Local consolidation meeting 1</i> Jawa Barat "Penguatan Efektivitas Peran Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Ormas Keagamaan dalam Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni di Jawa Barat"	11 April 2022
4	<i>Local consolidation meeting 1</i> Jawa Timur "Penguatan Efektivitas Peran Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Ormas Keagamaan dalam Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni di Jawa Barat"	12 April 2022
5	<i>Consultative Meeting #2</i> "Urgensi Penyusunan Payung Hukum Penanganan Deportasi dan Returni serta Koordinasi Pelaksanaan Piloting Modul Program Intervensi Persiapan Reintegrasi Sosial"	17 Mei 2022
6	Pelatihan <i>risk assessment tools</i> untuk Kementerian Sosial	24-25 Mei 2022
7	Pelatihan <i>risk assessment tools</i> untuk Idensos Densus 88 Anti-Terror	30-31 Mei 2022
9	Forum Nasional Multipihak "Urgensi Payung Hukum Penanganan Deportasi dan Returni"	5 Juni 2022
	<i>Local Consolidation Meeting 2</i> Jawa Barat "Upaya Mendorong Payung Hukum dalam Penanganan Deportasi dan Returni di Jawa Barat"	27 Juni 2022
10	Pilot intervensi "Kesiapan Reintegrasi Sosial Deportasi/Returni"	30 Juni 2022 sampai 2 Juli 2022
11	<i>Local consolidation meeting 2</i> Jawa Timur "Upaya Mendorong Payung Hukum dalam Penanganan Deportasi dan Returni di Jawa Timur"	4 Juli 2022
12	Rapat Koordinasi "Penyusunan Rancangan Perban bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikalisme"	7 Mei 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
13	<i>External peer review background paper</i> “Urgensi Payung Hukum Penanganan Deportasi dan Returni”	28 Juli 2022
14	<i>External peer review</i> Modul Intervensi Kesiapan Integrasi Masyarakat bagi Kelompok Terpapar	1 Agustus 2022
15	<i>Consultative meeting 3</i> “Program Intervensi Kesiapan Integrasi Masyarakat bagi Kelompok Terpapar”	10 Agustus 2022
16	<i>Workshop</i> “Penulisan Finalisasi Modul Intervensi Kesiapan Integrasi Masyarakat bagi Kelompok Terpapar”	14-15 Agustus 2022
17	Rapat Koordinasi Lanjutan Rancangan Perban bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang Terpapar Radikalisme	18 Agustus 2022
18	<i>Webinar series on P/CVE</i> “Memahami Ekstremisme Berkekerasan: Berkenalan Lebih Dekat dengan Deportasi dan Returni”	26 Agustus 2022
19	Forum Nasional 2 “Mengenali dan Menghadapi Ancaman Digitalisasi Ekstremisme Berkekerasan”	31 Agustus 2022
20	Pelatihan Modul Intervensi Kesiapan Integrasi ke Masyarakat bagi Kelompok Terpapar untuk Kementerian Sosial	2022-09-14 s/d 2022-09-16
21	<i>Webinar series on P/CVE #2</i> “Memahami Penanganan Ekstremisme Berkekerasan: Belajar dari Pengalaman Pendampingan Deportasi dan Returni”	30 September 2022
22	Pelatihan Modul Intervensi Kesiapan Integrasi ke Masyarakat bagi Kelompok Terpapar untuk BNPT dan Densus 88	27-29 September 2022
23	Forum Konsultasi Nasional “Konsolidasi Nasional Mempersiapkan Daerah dalam Mengawal Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam RAD PE”	5-6 Oktober 2022
24	<i>Consultative meeting 4</i> “Meninjau Sistem Penanganan Deportasi dan Returni serta Menyusun Rencana Bersama”	7 Oktober 2022
25	<i>Assessment</i> Pendampingan Deportasi dan Returni di RPTC Bambu Apus	10 Oktober 2022
26	<i>Local consolidation meeting 3</i> “Sosialisasi RAD PE dan Strategi Penguatan Efektivitas Peran <i>Multi-Stakeholder</i> dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berperspektif Gender dan Hak Anak dalam Mempersiapkan Implementasi RAD PE Jawa Barat”	11 Oktober 2022
27	<i>Local consolidation meeting 3</i> “Penguatan Efektivitas Peran <i>Multi-Stakeholder</i> dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berperspektif Gender dan Hak Anak dalam Mempersiapkan RAD Jawa Timur”	12 Oktober 2022
28	Diskusi paralel 7 konferensi HAM “Implementasi Kabupaten/Kota Berlandaskan Hak Asasi Manusia: Meninjau Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Deportasi dan Returni Terpapar Paham Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia”	20 Oktober 2022
29	Lokakarya <i>monitoring</i> dan evaluasi “Meninjau Penanganan Deportasi dan Returni dan Penyusunan Rencana Strategis ke Depan”	16 November 2022
30	Audiensi dengan Dit. Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Anti-Terror	19 Januari 2023
31	<i>Capacity building</i> “Strategi Kampanye dan Advokasi Digital untuk Pemajuan HAM dan Demokrasi”	16-17 2023
32	FGD Terbatas “Meninjau Penanganan Deportasi dan Returni” dengan SFCG, YPP, dan PAKAR	22 Februari 2023

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
GRAISEA2		
1	Penulisan Riset Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budi Daya Udang	20 Desember 2021 sampai 27 April 2022
2	Lokakarya “Menghubungkan UKM dan Produsen Kecil secara Adil ke Pasar dan Membangun Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”	31 Januari 2022
3	Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Riset Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budi Daya Udang	10 Februari 2022
4	<i>Webinar Series on Business and Human Rights</i> “Dukungan Negara dalam Praktik Perikanan Budi Daya”	23 Februari 2022
5	<i>External peer review</i> “Riset Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budi Daya Udang”	2022-03-21 dan 2022-03-22
6	Peluncuran Riset Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budi Daya Udang	2022-04-27
7	Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Rekomendasi Bersama untuk Strategi Nasional Bisnis dan HAM	16-17 Juni 2022
7	Pertemuan Nasional Bisnis dan HAM Indonesia “Respons Indonesia dalam Isu Bisnis dan HAM di Indonesia dan Global”	5 Juli 2022
8	<i>Webinar series on business and human rights</i> as pra-konferensi “Kabar Terbaru Hak Asasi Manusia dari Sektor Bisnis di Indonesia”	13 Juli 2022
9	Webinar series on business and human rights as WHRCF 2022 “How Cities Can Help Building Climate Change Resilience”	11 Oktober 2022
10	Seafood conference “Responsible and Sustainable Seafood Conference in Indonesia”	13-14 Des 2022
11	Kampanye Sosial Media Bisnis dan HAM	Jan-Des 2022
PREVENT		
1	Live IG #BiasakanToleran: “Muslimah 2023: Kesetaraan Gender dalam Islam dan Sikap Toleransi dalam Bergaul, <i>Kayak Gimana Tuh?</i> ” dengan Kalis Mardiasih	14 Januari 2022
2	Live IG #Biasakan Toleran: “Menyebarkan Pesan Islam Toleran yang Menghargai Perbedaan dalam Pergaulan Sehari-hari, <i>Kayak Gimana Sih?</i> ” Bersama K.H. Muhammad Nur Hayid	17 Januari 2022
3	<i>Online international seminar “Building International Cooperation to Reinforce Commitments and Practice of Islam as Rahmatan Lil Alamin”</i>	25-27 Januari 2022
4	Diskusi <i>online media campaign 2022</i>	16 Maret 2022
5	<i>Online media campaign for promoting tolerance, Democracy, and Peace-NU Online, IBTimes.ID, Islami.co, & Arrahim.id</i>	April - Desember 2022
6	Diskusi gagasan pendapat riset kualitatif “Pergerakan Peta Transformatif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Selama dan Pasca-Pandemi Covid-19”	8 April 2022
7	Pelatihan <i>online</i> peningkatan kompetensi guru PAI, moderasi beragama pada pembelajaran PAI di SMA/SMK	18-26 April 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
8	Diskusi riset kualitatif “Efektivitas Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dan Peta Gerakan HTI Selama dan Pasca-Pandemi Covid-19”	18 Mei 2022
9	Pelatihan kabupaten/kota HAM <i>online</i>	17-31 Mei 2022
10	Pelatihan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam di Allisa Resort Anyer Banten	3-5 Juni 2022
11	<i>Pre-workshop modul Youth Camp</i>	16 Juni 2022
12	Webinar kelas inspiratif untuk guru pendidikan agama Islam (alumni 4 angkatan pelatihan)	25 Juni 2022
13	Diskusi dan paparan rencana tindak lanjut	2-3 Juli 2022
14	Pengambilan data riset kualitatif HTI dan moderasi beragama	Juli - Agustus 2022
15	Sekolah Demokrasi <i>Online Batch 3</i>	8-29 Juli 2022
16	<i>Pra-konferensi sesi 1: ‘Eskalasi Pelanggaran HAM Dampak dari Digitalisasi Demokrasi?’</i>	11 Juli 2022
17	Diseminasi riset/sesi 4 pra-konferensi “Sikap dan Pandangan Generasi Z dan Milenial di Indonesia terhadap Toleransi, Kebhinekaan, dan Kebebasan Beragama”	14 Juli 2022
18	<i>Expert review modul Youth Camp “Muda Toleran”</i>	26 Juli 2022
19	<i>Live IG: Kenapa #MerawatToleransi Sejak Dini</i>	30 Juli 2022
20	Kunjungan jurnalis Pakistan ke-Indonesia dalam rangka promosi moderasi Islam Indonesia di Pakistan	12-22 Agustus
21	<i>Indonesia’s courtesy visit to Pakistan “Fostering International Cooperation to Promote Tolerance, Peace and Democracy in Indonesia and Pakistan”</i>	21-25 Agustus 2022
22	<i>Youth Camp “Muda Toleran” di Yogyakarta</i>	1-4 September 2022
23	Pelatihan kabupaten/kota HAM untuk tujuh kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta	13-15 September
24	<i>Indonesia’s courtesy visit to Malaysia “Fostering International Cooperation to Strengthen Tolerance, Peace and Democracy in Indonesia and Malaysia”</i>	25-28 Oktober
25	<i>Workshop instrumen penelitian Indeks HAM 2022</i>	22 November 2022
26	Pengambilan data Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2022	22 November - 5 Desember 2022
27	<i>Expert review Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2022</i>	7 Desember 2022
28	Peluncuran Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2022: Memperkuat Kinerja HAM di Kabupaten/Kota (kolaborasi Setara Institute - INFID)	10 Desember 2022
29	<i>Internal peer review riset kualitatif “Efektivitas Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama dan Peta Gerakan HTI Selama dan Pasca-Pandemi Covid-19”</i>	13 Desember 2022
30	Kelas Menulis untuk Perdamaian: #MencatatToleransiMerekamPerdamaian	16 Desember 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
HARMONI 2		
1	<i>Kick-off</i> Harmoni tahun kedua di kantor MSI	11 Agustus 2022
2	<i>Kick off</i> program Harmoni tahun kedua “Penguatan Kapasitas dan Kemitraan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Ormas Keagamaan untuk Efektivitas dan Keberlanjutan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme di Jawa Barat dan Jawa Timur”	17 Agustus 2022
3	Forum Nasional Multipihak “Mengenali dan Menghadapi Ancaman Digitalisasi Ekstremisme Berkekerasan”	31 Agustus 2022
4	<i>Workshop online</i> revisi Panduan Teknis Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Ekstremisme di Jawa Barat dan Jawa Timur	13 September 2022
5	Proses revisi “Panduan Teknis Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak yang Terpapar Paham Radikal Terorisme	1 September 2022
6	<i>Online multistakeholder forum</i> “Pentingnya Mengintegrasikan Kesetaraan Gender dalam Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak”	14 September 2022
7	Penanganan Ekstremisme Berkekerasan: Belajar dari Pengalaman Pendamping Deportasi dan Returni	30 September 2022
8	Forum Konsultasi Nasional “Mempersiapkan Daerah dalam Mengawal Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam RAD PE”	5 Oktober 2022
9	<i>Local consolidation meeting</i> Jawa Barat “Sosialisasi RAD PE dan Strategi Penguatan Efektivitas Peran <i>Multi-Stakeholder</i> dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berperspektif Gender dan Hak Anak dalam Mempersiapkan Implementasi RAD PE Jawa Barat”	11 Oktober 2022
10	<i>Local consolidation meeting multistakeholder</i> Jawa Timur “Penguatan Efektivitas Peran <i>Multistakeholder</i> dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial yang Berperspektif Gender dan Hak Anak dalam Mempersiapkan RAD di Jawa Timur”	12 Oktober 2022
11	<i>Focus Group Discussion</i> “Desain Policy Paper” Urgensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat”	17 Oktober 2022
12	<i>Focus Group Discussion</i> “Desain Policy Paper” Urgensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Timur”	17 Oktober 2022
13	Penyusunan kertas kebijakan “Urgensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat”	1 Oktober 2022
14	Penyusunan kertas kebijakan “Urgensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Timur”	1 Oktober 2022
15	PW Fatayat NU Jabar menyelenggarakan FGD pemerintah dengan tema “Urgensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat”	27 Oktober 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
16	PW Fatayat NU Jabar menyelenggarakan FGD OMS & ormas keagamaan dengan tema "Urgensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat"	27 Oktober 2022
17	<i>Peer review policy paper</i> "Urgensi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak"	10 November 2022
18	<i>Peer review policy paper</i> "Urgensi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak"	10 November 2022
19	Wawancara mendalam dengan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum, M. Syafaat Djauhari di Kantor Biro Hukum Provinsi Jawa Timur	18 November 2022
20	<i>Online local consolidation meeting</i> dengan tema "Urgensi Pembentukan dan Pembagian Peran Pokja RAD PE Jawa Barat"	22 November 2022
21	<i>Local consolidation meeting</i> "Penyusunan RAD PE dalam rangka Urgensi Proses Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak yang Berperspektif Gender dan Hak Anak di Jawa Timur"	1 Desember 2022
22	Diskusi dalam rangka urgensi proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak yang berperspektif gender dan hak anak di Jawa Timur	8 Desember 2022
23	<i>Local consolidation meeting offline</i> Jawa Barat dengan tema "Pengorganisasian dan Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat"	9 Desember 2022
24	<i>Local consolidation meeting</i> "Penyusunan RAD PE dalam rangka Urgensi Proses Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak yang Berperspektif Gender dan Hak Anak di Jawa Timur"	12 Desember 2022
25	Diskusi WAG dialog multipihak di Jawa Barat "Sharing implementasi buku Panduan Teknis INFID di lembaga tiap-tiap peserta <i>multistakeholder</i> "	21 Desember 2022

SDGs

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Rapat <i>update</i> OGI renaksi 14	6 Januari 2022
2	<i>Informal meeting</i> Bappenas TL DA OMS	7 Januari 2022
3	FGD riset gugatan hukum PBHI	11 Januari 2022
4	FGD konsolidasi pokja dan pemerintah Perpres Dana CSO	13 Januari 2022
5	FGD 2 PBHI INFID	20 Januari 2022
6	Rapat WG SDGs C20	2 Februari 2022
7	Workshop C20 Indonesia	3 Februari 2022
8	C20 Coordination WG SDGs Humanitarian	16 Februari 2022
9	MSF #1 RAN OGI	24 Februari 2022
10	FGD <i>expert review position paper</i> PBHI	2 Maret 2022
11	<i>Informal meeting</i> - Koordinasi <i>high level meeting</i> “Perkembangan dan Kendala Proses Penyusunan Peraturan Presiden Dana Abadi LSM”	4 Maret 2022
12	Tren Ketimpangan di Dunia dan Indonesia: Konteks Ekonomi, Gender, dan Ekologis	4 Maret 2022
13	FGD “Pembangunan Rendah Karbon dan Dukungan Parlemen”	16 Maret 2022
14	<i>Kick off</i> program BUILD	1 April 2022
15	Kolaborasi CSO dengan Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI	18 April 2022
16	<i>OGP participation & co-creations standards - implications and next steps for Indonesia's co-creation process</i>	26 April 2022
17	Rapat kolaborasi A4SD untuk PSC 2022	3 Mei 2022
18	Rakor <i>Chair</i> dan Sekretariat C20	20 Mei 2022
19	Konferensi Pers Dana Abadi LSM	1 Juni 2022
20	<i>Peer review</i> instrumen riset 100 <i>stakeholder</i> Kesehatan	3 Juni 2022
21	Rapat sekber Arah Kebijakan RAN OGI 2023-2024	3 Juni 2022
22	<i>OGI meeting with OGP Asia and the Pacific</i>	13 Juni 2022
23	<i>5-days site visit</i> Jayapura dan Manokwari	6 Juni 2022
24	Penggalan data melalui FGD “Serial Diskusi dan Penjaringan Aspirasi Komunitas untuk Merancang Isu Strategis untuk Penguatan Implementasi OGP di Indonesia Pasca-Pandemi COVID-19: <i>Civic Space</i> , Perempuan dan <i>Access to Justice</i> ”	10 Juni 2022
25	<i>Workshop</i> internal persiapan implementasi program USAID Kolaborasi	21 Juni 2022
26	<i>Peer review</i> instrumen riset BPJS Kesehatan dan perbandingan negara	23 Juni 2022
27	C20 Policy Brief Workshop	23 Juni 2022
28	<i>OGI gender meeting</i>	24 Juni 2022
29	Pembentukan <i>working group</i> - usulan Renaksi OGI 2023	30 Juni 2022
30	<i>Peer review</i> diskusi buku SDGs Desa	5 Juli 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
31	Podcast - Ngobrol Bareng #KitaBikinPaham Karir di NGO buat Anak Muda: Ngomongin Cuan hingga Masa Depan	9 Juli 2022
32	Meeting WG OGP Gender #1	12 Juli 2022
33	Pertemuan dengan Deputi Polhukam terkait OGP	12 Juli 2022
34	Konferensi SDGs dan Sidang Umum	19 Juli 2022
35	Konferensi SDGs dan Sidang Umum	19 Juli 2022
36	C20 Policy Brief Workshop	27 Juli 2022
37	Podcast - Ngobrol Bareng #KitaBikinPaham NGO vs Startup, Mana Karir yang Kamu Banget?	29 Juli 2022
38	Diskusi terfokus penyusunan riset "People's Scorecard 2022 for Sustainable Development Goals in Indonesia"	11 Agustus 2022
39	Rapat koordinasi INFID x Kemenkes & DTO: Komitmen 14 Renaksi OGI VI Tahun 2020-2022	12 Agustus 2022
40	Peer review laporan riset 50 stakeholder INFID	23 Agustus 2022
41	Expert review People's Score Card 2022 for Sustainable Development Goals in Indonesia	25 Agustus 2022
42	C20 Policy Workshop	30 Agustus 2022
43	Peer review riset stakeholders kesehatan: Studi pada Stakeholders Sistem Kesehatan di Indonesia	2 September 2022
44	GIZ - C20 Secretariat Update	8 September 2022
45	Pertemuan dengan Dit. KPAPO dan Direktorat Hukum dan Regulasi bersamaan dengan IJRS: Usulan Renaksi OGI tahun 2023-2024	14 September 2022
46	Diseminasi publik: Kajian Cepat Masyarakat Sipil Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB): Pendidikan dan Kesenjangan Gender Meningkat, namun Penurunan Ketimpangan dan Transisi Energi Masih Rendah	15 November 2022
47	Peer review riset BPJS Kesehatan: Studi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan: Tata Kelola, Efektivitas, dan Perbandingan dengan Kawasan ASEAN	16 September 2022
48	Video Eksplanatori - #KitaBikinPaham Apa itu LSM? #DanaAbadiLSM #JanganSampeGakLanjut	16 September 2022
49	Trilateral antara Kemenkes-Sekretariat OGI Bappenas-INFID Renaksi 2020/22	19 September 2022
50	Media briefing C20 Pre-Summit	26 September 2022
51	Dialog Publik Penguatan Visi Kebangsaan dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Berkelanjutan	28 September 2022
52	C20 Summit	5 Oktober 2022
53	Peer preview riset BPJS Kesehatan dan UHC di Negara ASEAN	18 Oktober 2022
54	3 days site visit Manokwari	26 Oktober 2022
55	Podcast - Ngobrol Bareng #KitaBikinPaham Warga dan NGO Satu Paket Penting dalam Demokrasi!	2 November 2022
56	Diseminasi publik: Studi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan: Tata Kelola, Efektivitas dan Perbandingan dengan Kawasan ASEAN	4 November 2022

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
57	<i>Multistakeholders Forum Open Government</i> dan Tata Kelola USAID Kolaborasi	7 November 2022
58	<i>Media Gathering Road to G20</i>	11 November 2022
59	FGD Evaluasi Usulan Masyarakat Sipil - Renaksi OGI 2023-2024	13 Desember 2022
60	Podcast - Ngobrol Bareng #KitaBikinPaham Hari Pahlawan: Sama-sama Kerja, Sama-sama Merdeka	25 November 2022
61	Konsultasi uji coba M-KIA	9 Desember 2022
62	Rapat penelaahan akhir Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII 2023-2024	9 Desember 2022
63	<i>Multistakeholder Forum</i> Inisiasi Pokja Layanan Kesehatan	16 Desember 2022
64	<i>Review Database OMS Pokja CSO-Bappenas</i> Sentul	19 Desember 2022

INEQUALITY

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	<i>Webinar “Apa Kabar RUU TPKS Kita?”</i>	24 Maret 2022
2	Rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU TPKS oleh Baleg	24 Maret 2022
3	Workshop research design need assessment	22 April 2022
4	<i>Webinar “Memperingati Hari Kartini: Strategi Mengawal Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual”</i>	27 April 2022
5	<i>Webinar Series Remain Project’s</i> Perempuan dalam Fotografi	8 Mei 2022
6	<i>Cross-Stakeholders Meetings “Layanan Kesehatan untuk Korban Kekerasan Seksual”</i> dilaksanakan oleh YKP	27 Mei 2022
7	Rangkaian FGD <i>needs assessment</i> mengenai: 1. Ketersediaan layanan untuk korban kekerasan seksual 2. Dana perwalian korban 3. Bantuan pemerintah untuk korban kekerasan seksual 4. Pencegahan kekerasan seksual	30 Mei 2022 sampai 3 Juni 2022
8	<i>Cross-stakeholders meetings “Strategi Komunikasi untuk Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual”</i> oleh KPI	11 Juni 2022
9	<i>Webinar series “Bagaimana Mekanisme Pelaporan dan Akses Layanan bagi Korban Kekerasan Seksual”</i> oleh YKP	24 Juni 2022
10	Konferensi pers “Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Riau”	28 Juni 2022
11	Pra-konferensi Sidang Umum Anggota INFID “Menilik Kembali RUU untuk Rakyat”	12 Juli 2022
12	<i>Peer review</i> Studi Barometer Sosial Kesenjangan Gender: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	29 Juli 2022
13	Workshop for Youth “Pelibatan Remaja dalam Mendukung UU TPKS melalui Kampanye Digital” oleh YKP	14-18 Juli 2022

14	Media <i>briefing</i> untuk penulis dan jurnalis muda “Menguatkan Upaya Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” oleh KPI	10 Agustus 2022
15	<i>Workshop peer review “Needs Assessment</i> Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” oleh INFID	12 Agustus 2022
16	Dialog kebijakan “Strategi Memastikan Pengaturan Kekerasan Berbasis Seksual dalam Revisi Rancangan KUHP” oleh KPI	12 Agustus 2022
17	Webinar Series “Aborsi Aman untuk Korban Kekerasan Seksual: Kisah-kisah Aids” oleh YKP	28 Agustus 2022
18	Media <i>briefing</i> “Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Berpihak pada Korban”	30 Agustus 2022
19	Sesi 1 <i>Workshop for Youth</i> “Menenal Jenis dan Bahaya KBGO” by KPI	17 September 2022
20	Sesi 2 <i>Workshop for Youth</i> “Perlindungan Hukum terhadap KBGO” by KPI	24 September 2022
21	<i>Webinar</i> cerita para pendamping “Bicara Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Khususnya pada Penanganan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif termasuk Aborsi Aman”	28 September 2022
22	Sesi 3 <i>Workshop for Youth</i> “Peran Pemerintah dalam Menangani KBGO” by KPI	1 Oktober 2022
23	Sesi 4 <i>Workshop for Youth</i> “Peran Pemuda dalam Mencegah KBGO” by KPI	8 Oktober 2022
24	Diseminasi Hasil Riset Kuantitatif dan Kualitatif terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	14 Oktober 2022
25	Diskusi paralel 3 konferensi HAM “ <i>Policy Dialogue</i> : Membahas Dua Hasil Riset untuk Masa Depan UU TPKS”	19 Oktober 2022
26	FGD bersama organisasi masyarakat sipil dalam upaya implementasi PP No. 61 Tahun 2014 dan PMK No. 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif serta Rekomendasi terhadap PP UU TPKS oleh KPI	2 November 2022
27	<i>Peer review policy paper</i> & konsepsi untuk Peraturan Turunan UU TPKS	14 November 2022
28	<i>Webinar</i> “Menakar Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Keagamaan” oleh KPI	18 November 2022
29	Diskusi terbatas “Memperkuat Kolaborasi Pemenuhan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Komprehensif bagi Korban Kekerasan Seksual serta <i>Update</i> Penyusunan PP UPTD-UU PKS” oleh YKP	6 Desember 2022

KELEMBAGAAN

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pelaksanaan Sidang Umum Anggota INFID	20 Juli 2022
2	Annual Work Plan	17 November 2022

DAFTAR PUBLIKASI TAHUN 2022

SDGs

NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
1	Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan: Tata Kelola, Efektivitas dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Kawasan ASEAN	Ari Wibowo, Alfian Helmi, Nur Hannah Muthohharoh, Ilhamda El Zuhri, Elsa Navitalian, Mohamad Yusuf, Bona Tua Parlinggomon Parhusip, Angelika Fortuna Dewi Rusdy
2	Independent Civil Society Assessment of National Delivery of the SDGs 2030 Agenda Indonesia CSO People Score Card 2022	Denisa Amelia Kawuryan, Angelika Fortuna Dewi Rusdy, Bona Tua Parlinggomon Parhusip, Grace Joanessa K. Putri, Rinto Leonardo Siahaan, Sugeng Bahagijo
3	Praktik Baik SDGs Desa: Studi Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa	Yanu Endar Prasetyo, Bona Tua Parlinggomon Parhusip, Denisa Amelia Kawuryan, Hegel Terome, Listyowati
4	Pengalaman Pendanaan Negara kepada CSO di 10 Negara	Purnama Adil Marata, Sugeng Bahagijo Bona Tua Parlinggomon P, Denisa Amelia Kawuryan
5	Policy Brief C20 SDGs and Humanitarian Working Group: From Indonesia, Doing More to the World's Vulnerable Citizens: For A More Prosperous, Humane and Inclusive Future	Andri Utami, Bona Tua Parlinggomon Parhusip, Fredy Chandra, Karla Mariana Klau, Ratna Yunita Syamsul Ardiansyah, Wahyu Susilo Zulyani Evi, Zubedy Koteng
6	Policy Brief People Score Card: Kajian Cepat Perspektif Masyarakat Sipil Mengenai Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan	Denisa Amelia Kawuryan, Angelika Fortuna Dewi Rusdy, Bona Tua Parlinggomon Parhusip, Grace Joanessa K. Putri, Rinto Leonardo Siahaan, Sugeng Bahagijo
7	Penguatan Layanan Kesehatan Pasca Pandemi COVID-19: Studi pada Stakeholder Sistem Kesehatan di Indonesia	Ari Wibowo, Alfian Helmi, Nur Hannah Muthohharoh, Ilhamda El Zuhri, Elsa Navitalian, Mohamad Yusuf Bambang Tri Daxoko, Bona Tua Parlinggomon P

HAM DAN DEMOKRASI

NO.	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
TANGGUH		
1	<i>Risk Assessment Tools "Kesiapan Integrasi Kelompok Terpapar Ekstremisme dan Radikalisme"</i>	Mirra Noor Milla, Bagus Takwin, Joevarian Hudiyan, Ahmad Naufalul Umam, Haykal Hafzul Arifn, Bidayatul Hidayah, Chandra Rila Putra, Diny Rachmayanti
2	<i>Modul Intervensi Kesiapan Integrasi ke Masyarakat bagi Kelompok Terpapar</i>	Mirra Noor Milla, M. Najih Arromadloni, Ahmad Naufalul Umam, Bidayatul Hidayah, Diny Rachmayanti, Bagus Takwin
3	<i>Background Paper: Urgensi Payung Hukum dalam Penanganan Deportasi dan Returni</i>	Hamdi Muluk, Vici Sofianna Putra, Nur'aini Azizah
BHR		
1	Laporan Akhir Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budi Daya Udang	Yanu Endar Prasetyo, Era Purnama Sari, Sugeng Bahagijo, Abdul Waidl Alyaa Nabiilah Zuhroh, Hendrikus Rizky Visanto Putro
2	Panduan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme	Siti Yulia Mazdafiah, Ida Rochmawati Dewi Winarti, AD. Eridani, Sanita Rini

NO.	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
-----	-----------------	---------

HARMONI

1	Pedoman Teknis Pendampingan Deportasi/Retur Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme: Panduan bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Ormas Keagamaan	Mira Kusumarini, Any Rufaedah
2	Kertas Kebijakan "Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Retur Perempuan dan Anak	Sri Mulyati, Neng Hannah, AD. Eridani, Sanita Rini
3	Kertas Kebijakan "Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Retur Perempuan dan Anak	Siti Yunia Mazdafiah, Ida Rochmawati Dewi Winarti, AD. Eridani, Sanita Rini

PREVENT

1	Efektivitas Kebijakan Moderasi Beragama dan Peta Gerakan HTI	Inayah Rohmaniyah, Ayik Heriansyah, Mahatva Yoga Adi Pradana, Rahma Lestari Budiono, Adhuri Mohamidi, Abdul Waidl, Sanita Rini
2	Modul Penguatan Keberagaman dan Toleransi untuk Orang Muda	Mohammad Pandu, Sarjoko S, Siti Munawaroh
3	Membangun Kerjasama Internasional Untuk Memperkuat Komitmen dan Praktik Islam Rahmatan Lil 'Alamin	Aguk Irawan, Ahmad Baso, Ahmad Najib Burhani, Alimatul Qibtiyah, Azaki Khoirudin, Diyah Puspitarini, Kalis Mardi Asih, Marzuki Wahid, Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, Syafawi Ahmad Qadzafi
4	Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) 2022	Sayyidatul Insiyah, Ikhsan Yosarie, Ismail Hasani, Abdul Waidl, Alyaa Nabillah Zuhroh, Hendrius Rizky Visanto

INEQUALITY

NO.	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
-----	-----------------	---------

1	LAPORAN PENELITIAN KUANTITATIF STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN GENDER: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Alfindra Primaldi, Dio Ashar Wicaksana, AD Eridani, Rizka Antika, M Naziful Haq, SRA Desyana
2	Laporan Penelitian Need Assessment: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Ratna Batara Munthi, Emma Mukarramah, Maidina Rahmawati
3	<i>Policy Paper</i> Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Nurlaila Hafidzoh, Evarisman, SRA Desyana, Rizka Antika, AD Eridani
4	<i>Policy Paper</i> Peraturan Pemerintah tentang Sumber, Peruntukan, dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban (DBK)	Sri Nurherwati, SRA Desyana, Rizka Antika, AD Eridani





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.LAI.00020/3.0258/AU.2/11/1668-2/1/VI/2023

Kepada Yth.
Manajemen
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Jakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap lembaga berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No.IAR. 00020/3.0258/AU.2/11/1668-2/1/VI/2023

To.
Management of
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Jakarta

Opinion

We have audited the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and statement of comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan lembaga dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi lembaga atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan lembaga.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.





- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal lembaga.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan lembaga untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan lembaga tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP. S. MANNAN, ARDIANSYAH DAN REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK /
PUBLIC ACCOUNTANT FIRM
NIU-KAP / Office License : KEP 1430/KM.1/2012



Hasnawati, CPA
Rekan/ Partner

NIAP/ Public Accountant License No. AP. 1668
Jakarta, 5 Juni 2023/ June 5, 2023

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT
(INFID)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT
(INFID)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2022 DAN 2021
(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2022	Catatan / Notes	2021	DESCRIPTIONS
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	14.143.204.314	2a,2c, 3	11.293.000.171	Cash and cash equivalents
Piutang lain - lain	1.185.240.700	2a,2d, 4	1.825.371.668	Others account receivable
Uang muka	1.264.979.700	2a,2e, 5	114.484.570	Advances
Total aset lancar	16.593.424.714		13.232.856.409	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Investasi	-	2a,2f, 6	2.546.493.606	Investment
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp.934.922.019 dan 2021 sebesar Rp.800.139.697)	9.017.136.220	2a,2g, 7	334.831.142	Fixed assets (After decreased with accumulated depreciation 2022 of IDR. 934.922.019 and 2021 of IDR. 800.139.697)
Total aset tidak lancar	9.017.136.220		2.881.324.748	Total non current assets
Total aset	25.610.560.934		16.114.181.157	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	1.707.317.386	2a,2h, 8	1.817.889.632	Accrued expenses
Utang pajak	261.317.727	2a,2j, 9	84.984.313	Tax payable
Titipan dana	1.283.993.913	2a,2i, 10	1.752.149.621	Reserved funds
Total liabilitas jangka pendek	3.252.629.026		3.655.023.565	Total current liabilities
Total liabilitas	3.252.629.026		3.655.023.565	Total liabilities
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto akhir tahun		2a,2k, 11		Net assets end of year
Dengan pembatasan	9.393.326.905		9.346.529.274	With restrictions
Tanpa pembatasan	12.964.605.004		3.112.628.318	Without restrictions
Total aset neto	22.357.931.908		12.459.157.592	Total net assets
Total liabilitas dan aset neto	25.610.560.934		16.114.181.157	Total liabilities and net assets



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

